



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1 SFM IFCC

Kami **PT Mutuagung Lestari Tbk**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Lestari IFCC yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Unit Manajemen	: PT Tunas Timber Lestari
Lingkup Sertifikasi	: PBPH - Hutan Alam
No. Perizinan	: SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.624/MenLHK/Setjen/HPL.3/9/2021 Tanggal 8 September 2021
Luas	: ± 214.935 Ha
Lokasi	: Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan
Alamat Kantor	: Wisma Korindo Lt. 12 - 15 Jl. MT. Haryono Kav. 62 Jakarta Selatan

Berdasarkan hasil penilaian Pengelolaan Hutan Lestari Standar IFCC dan pengambilan keputusan dinyatakan **"MEMENUHI"** dan dapat diterbitkan Sertifikat SFM IFCC. Penilaian dan pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Standar IFCC ST 1001:2021 tentang Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari.

Apabila ada keluhan/banding sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LSSFM IFCC PT Mutuagung Lestari, Tbk.

Depok, 03 Juli 2024




Dinar Dara Tri PP *mf*
VP OP I SBU Sertifikasi Kahutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**SUMMARY OF SURVEILLANCE 1 AUDIT RESULTS
SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT – IFCC
PT TUNAS TIMBER LESTARI**

**RESUME HASIL PENILIKAN 1
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI SKEMA IFCC
PT TUNAS TIMBER LESTARI**

(1) Identitas LSSFM IFCC

- a. Institution Name / Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Accreditation Number / Nomor Akreditasi : LSSFM-001-IDN
- c. Address / Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Phone/Fax/Email/Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. President Director/Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standard / Standar : IFCC ST 1001 : 2021 (*Sustainable Forest Management Requirement*)
- g. Audit Team / Tim Audit : Amin Kadeni (Lead Auditor / Produksi)
Miftah Farid (Lead Auditor Magang/Sosial)
Aep Sukendar (Anggota Tim/Ekologi)
- h. Audit Date / Tanggal Audit : 29 Mei sd 06 Juni 2024
- h. Decision Making Team /
Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Dinar Dara TPP, M.Si.

(2) Identitas Auditee

- a. *Management Unit* / Nama Unit Manajemen : PT Tunas Timber Lestari
- b. *Management Unit Legality* /
Legalitas Unit Manajemen : SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.624/MenLHK/Setjen/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021
- c. *Area* / Luas : ± 214.935 Ha
- d. *Management Unit Address* /
Alamat Unit Manajemen : Kantor Pusat: Wisma Korindo Lt. 12 - 15 Jl. MT. Haryono Kav. 62 Jakarta Selatan, Kantor Cabang: Jl. Garuda Spadem No. 2B Merauke, Provinsi Papua Selatan, Kantor Operasional: Komplek Perkantoran Korindo – Kampung Asiki Distrik Jair Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan
- e. *Phone/ Fax/ E-mail* / Telepon/ Faks/ Email : 021-7975959
- f. *Managers* / Pengurus : Direktur Utama: Kim Young Cheol
Direktur: Kim Jong Man
Direktur: Vinoba Chandra
- g. *Location* / Letak Areal : Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan

(3) Stage Resume / Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
<i>Stakeholders Consultation</i> Konsultasi Para Pihak	<i>29 April 2024 and during of the audit</i> 29 April 2024 dan pada saat kegiatan audit.	Proses konsultasi para pihak telah dilakukan untuk memberikan kesempatan pada para pihak menyampaikan komentar terkait operasional pengelolaan hutan. Konsultasi dilakukan menggunakan email sebelum kegiatan terhadap 23 responden, dan melalui wawancara langsung dengan Masyarakat saat pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p><i>The stakeholder consultation process was conducted to provide an opportunity for stakeholders to provide comments related to forest management operations. Consultations were conducted using email prior to the activity with 16 respondents, and through direct interviews with the Community during the audit.</i></p>
<p><i>Opening Meeting</i> Pertemuan Pembukaan</p>	<p>29 Mei 2024 PT Tunas Timber Lestari</p>	<p>Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan anggota Tim Audit • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Standard dan Pedoman audit yang digunakan • Metodologi pelaksanaan audit • Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksihuan, CARs, rekomendasi) dan noma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan. <p><i>The opening meeting activities have been carried out, the materials presented include:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Introduction of Audit Team members</i> • <i>Objectives and scope of the audit implementation and audit criteria to be used</i> • <i>Audit standards and guidelines used</i> • <i>Audit implementation methodology</i> • <i>Status and definition of types of records (non-conformities, CARs, recommendations) and assessment norms used (Good, Fair or Bad)</i> • <i>Appointment of Personnel In Charge (PIC) from the Auditee for each auditor</i> • <i>Resources and facilities required in the implementation of the audit</i> • <i>Confirmation of availability, completeness, and transparency of data can be met by the Auditee</i> • <i>Request for a power of attorney/management letter of Representative Management</i> • <i>Signing of the Minutes of the Opening Meeting.</i>
<p><i>Document Verification, interview and Field Observation</i> Verifikasi Dokumen, wawancara dan Observasi Lapangan</p>	<p>30 Mei – 03 Juni 2024 PT Tunas Timber Lestari</p>	<p>Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan. Verifikasi juga dilakukan terhadap kemajuan dari tindakan perbaikan atas CARs tahun sebelumnya.</p>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>The audit team has collected, studied the auditee's data and documents, and analyzed them using the criteria and indicators set out in these provisions.</p> <p>Field observations have been conducted by the Audit Team to test the accuracy of the data through observation, recording, random testing, and analysis using the established criteria and indicators.</p> <p>Verification is also conducted on the progress of corrective actions on the previous year's CARs.</p>
Closing Meeting Pertemuan Penutupan	04 Juni 2024 PT Tunas Timber Lestari	<p>Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan. <p>The closing meeting activities has been carried out, the materials presented include:</p> <ul style="list-style-type: none"> Evaluation of the implementation of the audit that has been carried out Submission of interim results of the assessment and confirmation of the audit results and findings Explanation of the next certification stages Signing of the Minutes of the Closing Meeting.
Decision Making Pengambilan Keputusan	03 Juli 2024 PT Mutuagung Lestari	<p>PT Tunas Timber Lestari diputuskan memenuhi standar IFCC ST 1001:2021 – Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari</p> <p>PT Tunas Timber Lestari has been determined to comply the IFCC ST 1001:2021 standard – Sustainable Forest Management Requirements</p>

(4) Progress of Corrective Actions from Previous Audits / Progres Tindakan Perbaikan Audit Sebelumnya

No	Klausul	Ketidaksesuaian	Hasil Verifikasi
1.	4.2.1 – Minor	<ul style="list-style-type: none"> Unit manajemen telah memiliki Ganis PH yaitu: Canhut (2 orang), Binhut (1 orang), dan PKBR (4 orang) serta 6 orang sarjana kehutanan, namun belum memiliki Ganis Kurpet dan Nenhut (belum ikut uji kompetensi). Belum terbentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKS Bipartit) sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permenakertrans No. PER.32/MEN/XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit. <p>- The management unit already has Ganis PH, namely: Canhut (2 people), Binhut (1 person), and PKBR (4 people) and 6 forestry graduates, but does not yet have Ganis Kurpet and Nenhut (have not participated in the competency test). - The Bipartite Cooperation Institution (LKS Bipartit) has not been formed in accordance with the requirements in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and Permenakertrans No. PER.32/MEN/XII/2008 concerning Procedures for the Formation and Composition of Membership of the Bipartite Cooperation Institution.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Saat ini PT TTL telah memiliki Tenaga Teknis CANHUT (3 orang), NENHUT (1 orang), BINHUT (1 orang) dan PKB-R (3 orang). Sehingga masih belum tersedia GANIS KURPET serta GANIS NENHUT yang teredia belum memiliki sertifikat kompetensi. PT Tunas Timber Lestari telah membuat surat Direktur nomor 058a/PRC-ASK/TTL/V/2024 tanggal 07 Mei 2024 perihal Uji Kompetensi GANIS KURPET dan NENHUT yang ditujukan kepada Ketua LSP Bina Lingkungan Kehutanan, dan surat nomor 05b/PRC-ASK/TTL/V/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang ditujukan kepada Ketua APhi pusat perihal Diklat Tenaga Teknis KURPET. Seluruh surat telah dilengkapi dengan tanda terima. Surat dari LSP Bina Mutu Lingkungan Kehutanan nomor S.250/LSP-BLK/V/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal info Uji Kompetensi Tenaga Teknis Pengukuran

No	Klausul	Ketidaksesuaian	Hasil Verifikasi
			<p>dan Perpetaan dan Pemanenan Hutan sebagai balasan atas surat Direktur PT TTL nomor 058a/PRC-ASK/TTL/V/2024 tanggal 07 Mei 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> PT TTL telah menunjukkan bukti proses pengesahan LKS Bipartit berupa surat nomor 074/PRC-KH/TTL/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pengesahan LKS Bipartit PT TTL 2024-2027 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boven Digoel. Surat telah dilengkapi dengan lampiran Berita Acara Pembentukan Bipartit yang ditandatangani oleh perwakilan Perusahaan dan pekerja tanggal 19 Juni 2024, dan dilengkapi dengan notulen rapat, daftar hadir dan foto kegiatan Pembentukan Lembaga Bipartit. (CLOSED) Currently, PT TTL has CANHUT Technical Personnel (3 people), NENHUT (1 person), BINHUT (1 person) and PKB-R (3 people). So there is still no GANIS KURPET available and the available GANIS NENHUT does not have a competency certificate. PT Tunas Timber Lestari has made a Director's letter number 058a / PRC-ASK / TTL / V / 2024 dated May 7, 2024 concerning the Competency Test of GANIS KURPET and NENHUT addressed to the Head of the Forestry Environmental Development LSP, and letter number 05b / PRC-ASK / TTL / V / 2024 dated May 7, 2024 addressed to the Head of the APHI center concerning KURPET Technical Personnel Training. All letters have been completed with a receipt. Letter from LSP Bina Mutu Lingkungan Kehutanan number S.250/LSP-BLK/VI/2024 dated June 20, 2024 regarding information on Competency Test for Technical Personnel for Measurement and Mapping and Forest Harvesting in response to letter from Director of PT TTL number 058a/PRC-ASK/TTL/V/2024 dated May 7, 2024. PT TTL has shown proof of the LKS Bipartite ratification process in the form of letter number 074/PRC-KH/TTL/VI/2024 dated June 20, 2024 regarding Ratification of LKS Bipartite PT TTL 2024-2027 addressed to the Head of the Manpower and Transmigration Office of Boven Digoel Regency. The letter has been completed with an attachment of the Minutes of the Formation of the Bipartite signed by representatives of the Company and workers dated June 19, 2024, and is completed with meeting minutes, attendance list and photos of the activities of the Formation of the Bipartite Institution. (CLOSED)

No	Klausul	Ketidaksesuaian	Hasil Verifikasi
2.	7.4.6 - Minor	<p>Pada Blok RKT dengan sistem silvikultur TPTJ tersebut, PT TTL melakukan penanaman pada jalur tanaman dengan jenis yang dipilih yaitu Nyatoh yang merupakan spesies domestik papua dan jenis <i>Shorea leprosula</i> yang merupakan jenis eksotik yang didatangkan dari luar Papua.</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Tim Pakar Silvikultur Intensif dari Universitas Palangka Raya, Kementerian Kehutanan dan PT TTL pada tahun 2009-2014 yang telah dipublikasikan dalam Prosiding Seminar Nasional Silvikultur II tanggal 28 Agustus 2014, yang diterbitkan oleh Universitas Gajah Mada, jenis <i>Shorea leprosula</i> adalah jenis eksotik yang paling sesuai dikembangkan pada sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) di Papua karena riap tanaman <i>Shorea leprosula</i> lebih tinggi dibanding riap jenis domestik seperti Matoa (<i>Pometia pinnata</i>), Nyatoh (<i>Palaquium</i> sp), Merawan (<i>Hopea</i> sp), Resak (<i>Vatica</i> sp) dan Mersawa (<i>Anisoptera</i> spp).</p> <p>Namun PT TTL belum melakukan kajian secara ilmiah dampak terhadap ekosistem dan terhadap integritas genetiknya dari penggunaan jenis eksotik <i>Shorea leprosula</i> pada sistem silvikultur TPTJ tersebut.</p> <p><i>In the RKT Block with the TPTJ silviculture system, PT TTL planted on the plant path with the selected types, namely Nyatoh which is a domestic Papuan species and the Shorea leprosula type which is an exotic type imported from outside Papua. Based on the results of research conducted by the Intensive Silviculture Expert Team from Palangka Raya University, the Ministry of Forestry and PT TTL in 2009-2014 which has been published in the Proceedings of the National Silviculture Seminar II on August 28, 2014, published by Gajah Mada University, the Shorea leprosula type is the most suitable exotic type to be developed in the Selective Cutting and Planting Path (TPTJ) silviculture system in Papua because the Shorea leprosula plant growth is higher than the growth of domestic types such as Matoa (Pometia pinnata), Nyatoh (Palaquium sp), Merawan (Hopea sp), Resak (Vatica sp) and Mersawa (Anisoptera spp). However, PT TTL has not conducted a scientific study on the impact on the ecosystem and its genetic integrity from the use of the exotic Shorea leprosula species in the TPTJ silviculture system.</i></p>	<p>PT Tunas Timber Lestari telah melakukan kajian secara ilmiah dampak terhadap ekosistem dan terhadap integritas genetik dari penggunaan jenis eksotik <i>Shorea leprosula</i> pada areal SILIN. PT Tunas Timber Lestari telah mengirimkan bukti hasil kajian secara ilmiah dengan judul Kajian Dampak Expansive Jenis <i>Shorea leprosula</i> Terhadap Jenis Endemik di Areal Blok Silin PBPH PT Tunas Timber Lestari di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan yang disusun oleh Tim Silvikultur Intensif PT Tunas Timber Lestari. (CLOSED)</p> <p><i>PT Tunas Timber Lestari has conducted a scientific study of the impact on the ecosystem and genetic integrity of the use of exotic Shorea leprosula species in the SILIN area. PT Tunas Timber Lestari has submitted evidence of the results of the scientific study entitled Study of the Expansive Impact of Shorea leprosula Species on Endemic Species in the Silin Block Area of PBPH PT Tunas Timber Lestari in Boven Digoel Regency, South Papua Province, compiled by the Intensive Silviculture Team of PT Tunas Timber Lestari. (CLOSED)</i></p>
3.	5.1.1 - Minor	<p>Unit Manajemen telah melakukan penilaian terhadap resiko pengelolaan terutama dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar akibat kegiatan pengelolaan hutan, yaitu sudah teridentifikasi dalam dokumen AMDAL PT TTL yang dibuat pada tahun 1995, dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Komisi Pusat Departemen Kehutanan Nomor 94/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 12 Mei 1995 dengan Lingkup Studi AMDAL seluas 200.000 Ha serta terdapat Matrik RKL dan RPL IUPHHK-HA PT TTL terhadap Komponen Lingkungan. Berdasarkan dokumen tersebut, kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan adalah PWH/pembangunan jalan, penebangan, penyaradan dan pengangkutan. PT TTL telah menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan untuk meminimalkan resiko yang terjadi.</p> <p>Namun berdasarkan hasil verifikasi lebih lanjut, diketahui bahwa ruang lingkup kajian AMDAL seluas 200.000 Ha, sedangkan luas aktual adalah 214.935 Ha. Selain itu dokumen AMDAL dibuat tahun 1995 (telah berusia 28 tahun) sehingga sudah tidak</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan MR PT TTL, diketahui bahwa, terdapat perubahan luas areal kerja PT Tunas Sawaema dari semula 200.000 Ha menjadi 244.850 Ha sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 742/Kpts-II/1996 tanggal 26 November 1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 76/Kpts-II/1996 tanggal 06 Februari 1996 tentang Pemberian areal HPH kepada PT Tunas Sawaema. Dengan adanya perubahan SK tersebut terdapat penambahan areal kerja seluas 44.850 Ha.</p> <p>Dengan adanya penambahan areal kerja tersebut PT Tunas Sawaema telah melakukan kajian AMDAL baru adanya penambahan luas areal kerja dan telah mendapat pengesahan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen</p>

No	Klausul	Ketidaksesuaian	Hasil Verifikasi
		<p>relevan dengan situasi dan kondisi saat ini, karena sudah terdapat beberapa perubahan seperti nama perusahaan, penanggung jawab, situasi dan kondisi aktual di lapangan saat ini, dll</p> <p><i>The Management Unit has assessed the management risks, especially the impacts on the surrounding environment due to forest management activities, which have been identified in the PT TTL AMDAL document made in 1995, and has been approved based on the Decree of the Central Commission of the Ministry of Forestry Number 94/DJ-VI/AMDAL/95 dated May 12, 1995 with an AMDAL Study Scope of 200,000 Ha and there is a Matrix of RKL and RPL IUPHHK-HA PT TTL on Environmental Components. Based on the document, activities that cause negative impacts on the environment are PWH/road construction, logging, skidding and transportation. PT TTL has developed a management and monitoring plan to minimize the risks that occur.</i></p> <p><i>However, based on the results of further verification, it is known that the scope of the AMDAL study is 200,000 Ha, while the actual area is 214,935 Ha. In addition, the AMDAL document was made in 1995 (28 years old) so that it is no longer relevant to the current situation and conditions, because there have been several changes such as the name of the company, the person in charge, the actual situation and conditions in the field today, etc.</i></p>	<p>Kehutanan sesuai Surat Nomor: 41/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 10 April 1996, Perihal: Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL HPH PT Tunas Sawaerma di Provinsi Irian Jaya dengan luas lingkup studi berdasarkan areal pencadangan seluas 67.200.</p> <p>Pada tahun 1998 terdapat pelepasan kawasan hutan yang terletak di HPH PT Tunas Sawaerma seluas 14.783 Ha sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 171/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan dari Kelompok Hutan S Digul -S Uwim yang terletak di Kabupaten DATI II Merauke Provinsi Irian Jaya yang terdiri atas Blok A seluas 14.783 Ha dan Blok B 19.486,50 Ha. (Untuk luas pelepasan kawasan hutan Blok B seluas 19.486,50 Ha tidak terkait dengan areal HPH PT Tunas Sawaerma).</p> <p>Sehingga berdasarkan uraian tersebut ruang lingkup AMDAL telah mencakup seluruh areal kerja, yaitu seluas 214.935 Ha sesuai SK Perpanjangan yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 711/Menhut-II/2010 tanggal 27 Desember 2010.</p> <p>Pada saat Audit Sertifikasi tahun 2023 Dokumen AMDAL akibat adanya penambahan luas areal kerja tidak ditunjukkan.</p> <p>Terkait relevansi dokumen AMDAL yang telah dibuat pada tahun 1995 dan tahun 1996, berdasarkan wawancara dengan MR PT TTL dokumen AMDAL masih relevan dan masih dapat dipergunakan sampai saat ini, hal ini dibuktikan dengan pada saat pengurusan izin TPS LB3 yang diintegrasikan dengan Persetujuan Lingkungan diperlukan persyaratan untuk submit di website AMDALNET dan PTSP KLHK Online adalah dokumen AMDAL yang dimiliki. Dan dokumen AMDAL yang tersedia tersebut telah di-submit dan terkonfirmasi telah divalidasi "YA". Artinya dokumen AMDAL tersebut masih bisa digunakan untuk kondisi saat ini. (CLOSED)</p> <p><i>Based on the results of document verification and interviews with MR PT TTL, it is known that there is a change in the working area of PT Tunas Sawaerma from the original 200,000 Ha to 244,850 Ha in accordance with the Decree of the Minister of Forestry Number: 742/Kpts-II/1996 dated November 26, 1996 concerning Amendments to the Decree of the Minister of Forestry Number: 76/Kpts-II/1996 dated February 06, 1996 concerning Granting HPH area to PT Tunas Sawaerma. With the amendment of the decree, there is an additional working area of 44,850 Ha.</i></p> <p><i>With the addition of the work area, PT Tunas Sawaerma has conducted a new AMDAL study</i></p>

No	Klausul	Ketidaksesuaian	Hasil Verifikasi
			<p><i>of the additional work area and has received approval from the Central AMDAL Commission of the Ministry of Forestry in accordance with Letter Number: 41/DJ-VI/AMDAL/96 dated April 10, 1996, Subject: Approval of ANDAL, RKL and RPL of PT Tunas Sawaerma HPH in Irian Jaya Province with a study scope based on a reserve area of 67,200.</i></p> <p><i>In 1998 there was a release of forest area located in HPH PT Tunas Sawaerma covering an area of 14,783 Ha in accordance with the Decree of the Minister of Forestry Number: 171/Kpts-II/1998 dated February 27, 1998 concerning the Release of Forest Area from the S Digul -S Uwim Forest Group located in DATI II Merauke Regency, Irian Jaya Province consisting of Block A covering an area of 14,783 Ha and Block B covering an area of 19,486,50 Ha. (The forest area released for Block B of 19,486.50 Ha is not related to the HPH area of PT Tunas Sawaerma).</i></p> <p><i>Therefore, based on this description, the scope of the AMDAL has covered the entire working area, which is 214,935 Ha according to the Extension Decree based on the Decree of the Minister of Forestry Number: 711/Menhut-II/2010 dated December 27, 2010.</i></p> <p><i>At the time of the Certification Audit in 2023, the EIA document due to the additional work area was not presented.</i></p> <p><i>Regarding the relevance of AMDAL documents that have been made in 1995 and 1996, based on interviews with MR PT TTL, AMDAL documents are still relevant and can still be used today, this is evidenced by the processing of the TPS LB3 permit which is integrated with the Environmental Approval, the requirements for submitting on the AMDALNET website and PTSP KLHK Online are the AMDAL documents owned. And the available AMDAL documents have been submitted and confirmed to have been validated "YES". This means that the AMDAL document can still be used for current conditions. (CLOSED)</i></p>
4.	5.2.4 - Minor	<p>Telah memiliki dokumen identifikasi HHBK, namun belum dapat menyajikan dokumen perjanjian kerja sama antara perusahaan dan masyarakat yang masih memanfaatkan HHBK yaitu Marga Katinggo, Yarep, Kiripan, Diarop, Mindipko, Kamit, Ea, Kurip Kiran.</p> <p><i>Has a NTFP identification document, but has not been able to present a cooperation agreement document between the company and the community that still utilizes NTFPs, namely the Katinggo Clan, Yarep, Kiripan, Diarop, Mindipko, Kamit, Ea, Kurip Kiran.</i></p>	<p>Dapat ditunjukkan Surat Kesepahaman tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Kesepahaman tentang Pemanfaatan HHBK tanggal 27 April 2024, dengan marga Yarep, Diarop dan Katinggo yang diwakilkan oleh marga Marga Yarep ditandatangani oleh Petrus Anggianop • Surat Kesepahaman tentang Pemanfaatan HHBK tanggal 27 April 2024, dengan marga Kiripan ditandatangani oleh Fransiskus Kayun • Surat Kesepahaman tentang Pemanfaatan HHBK tanggal 27 April 2024, dengan marga Mindipko, Kamit, Ea, Kurip Kiran dan Beamkuburan yang diwakili oleh

No	Klausul	Ketidaksesuaian	Hasil Verifikasi
			<p>marga Mindipko dan ditandatangani oleh Rofinus Wandip</p> <p>Dalam surat kesepahaman dibahas mengenai kesepakatan terhadap PT TTL sebagai pemegang izin, keberadaan hak ulayat, dan pemahaman bersama terhadap akses pemanfaatan HHBK dengan memenuhi ketentuan pemerintah, tidak melakukan kegiatan yang merusak lingkungan dan tidak melakukan perburuan terhadap hewan dilindungi. (CLOSED)</p> <p><i>Letter of Understanding on Utilization of Non-Timber Forest Products can be shown:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> •Letter of Understanding on the Utilization of NTFPs dated April 27, 2024, with the Yarep, Diarop and Katinggo clans represented by the Yarep clan signed by Petrus Anggianop. •Letter of Understanding on the Utilization of NTFPs dated April 27, 2024, with the Kiripan clan signed by Fransiskus Kayun •Letter of Understanding on Utilization of NTFPs dated April 27, 2024, with Mindipko, Kamit, Ea, Kurip Kiran and Beamkuburan clans represented by Mindipko clan and signed by Rofinus Wandip. <p><i>The letter of understanding discusses the agreement with PT TTL as a permit holder, the existence of customary rights, and mutual understanding of access to NTFP utilization by fulfilling government regulations, not carrying out activities that damage the environment and not hunting protected animals. (CLOSED)</i></p>
5.	5.3.1.1 - Minor	<p>Unit Manajemen telah menunjukan Daftar Dokumen Peraturan yang menjadi acuan dalam pengelolaan hutan, yang berisi informasi Nomor Perundangan/Peraturan dan Judul Regulasi, namun belum mencantumkan Pasal, Ayat dan Deskripsi Persyaratan yang menentukan bagaimana kewajiban kepatuhan ini berlaku untuk organisasi, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 156 huruf (o) PBPH Wajib melaksanakan pemanenan hasil hutan kayu dengan menerapkan teknik pembalakan berdampak rendah/RIL terkait RIL sebagian besar tahapan RIL belum diterapkan. b. PermenLHK No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Pasal 127 terkait kewajiban melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan batas areal kerja dan Pasal 128, Laporan setiap tahun disampaikan kepada Kepala BPKHTL dan PBPH belum menunjukan bukti pemeliharaan dan pengamanan batas areal serta bukti penyampaian Laporan. c. PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 154 angka (6) Kegiatan ITSP harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sebelum penebangan sebagai dasar penyusunan RKTPH, terkait tata waktu pelaksanaan ITSP belum dipenuhi oleh PBPH 	<p>Telah ditunjukkan dokumen Monitoring Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan periode Semester 2 Tahun 2023, dokumen yang di Monev terdiri dari 11 kelompok peraturan. Informasi dalam dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor Peraturan - Judul Regulasi - Departemen, (terkait peraturan) - Pasal, Ayat, Deskripsi Persyaratan - Evaluasi: Kode C/sesuai, Kode PC/Sesuai Sebagian, Kode NC/Tidak Sesuai <p>Hasil Evaluasi Semester 2 Tahun 2023: C=97,8% PC=1,9% NC=0,2%</p> <p>Peraturan P 8 tahun 2021 terkait RIL, ITSP (PermenLHK 8/2021) dan kewajiban penyampaian laporan pemeliharaan dan pengamanan batas areal kerja (PermenLHK No. 7 tahun 2021, telah tercantum dalam dokumen daftar Monitoring kepatuhan terhadap peraturan. (CLOSED)</p> <p><i>The Monitoring of Compliance with Laws and Regulations document for Semester 2 of 2023</i></p>

No	Klausul	Ketidaksesuaian	Hasil Verifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Lampiran IX tentang Pedoman ITSP, terkait Fomat Laporan Kegiatan ITSP Laporan Hasil ITSP Tahun 2022 dan 2023 yang telah ditunjukkan tidak dilengkapi dengan Tally Sheet Hasil ITSP yang seharusnya memuat ID Barcode pohon tebang dan data pohon inti dan data Rekapitulasi LHC hasil ITSP hanya memuat data pohon diameter 40 ke atas. - Hasil pemeriksaan lapangan di petak BC-57, BC-58, BD-58, AE-38, AE-39, AF-43, AF-42, AG-42 dan AG-43 tidak ada penandaan label kuning untuk pohon inti <p><i>The Management Unit has shown a List of Regulatory Documents referenced in forest management, which contains information on the Law/Regulation Number and Title of the Regulation, but does not include the Article, Paragraph and Description of Requirements that specify how this compliance obligation applies to the organization, including:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Government Regulation No. 23 of 2021 concerning the Implementation of Forestry Article 156 letter (o) PBPH Must carry out the harvesting of timber forest products by applying low impact logging techniques / RIL related to RIL most of the RIL stages have not been implemented. b. PermenLHK No. 7 of 2021 concerning Forestry Planning, Article 127 related to the obligation to carry out maintenance and security of work area boundaries and Article 128, Reports are submitted annually to the Head of BPKHTL and PBPH has not shown evidence of maintenance and security of area boundaries and proof of submission of Reports. c. Minister of Environment and Forestry Regulation No. 8 of 2021 on Forest Planning and Preparation of Forest Management Plans and Forest Utilization in Protected Forests and Production Forests: <ul style="list-style-type: none"> - Article 154 point (6) ITSP activities must be carried out within a maximum period of 2 (two) years before logging as the basis for preparing the RKTPH, related to the timeframe for implementing ITSP has not been fulfilled by PBPH. - Appendix IX of the ITSP Guidelines, related to the ITSP Activity Report Format The ITSP Result Reports for 2022 and 2023 that have been shown are not equipped with the ITSP Result Tally Sheet which should contain the ID Barcode of felled trees and core tree data and the LHC Recapitulation data of ITSP results only contains data on trees with diameters of 40 and above. - Field inspection results in plots BC-57, BC-58, BD-58, AE-38, AE-39, AF-43, AF-42, AG-42 and AG-43 no yellow labeling for core trees 	<p><i>has been shown, the M&E document consists of 11 groups of regulations. Information in the document:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Regulation Number - Regulation Title - Department, (regulation related) - Article, Paragraph, Description of Requirements - Evaluation: Code C/Compliant, Code PC/Partially Compliant, Code NC/Not Compliant <p><i>Evaluation Results of Semester 2 Year 2023:</i> C=97,8% PC=1.9% NC=0.2%</p> <p><i>Regulation P 8 of 2021 related to RIL, ITSP (PermenLHK 8/2021) and the obligation to submit reports on the maintenance and security of work area boundaries (PermenLHK No. 7 of 2021, has been included in the document Monitoring list of compliance with regulations. (CLOSED)</i></p>
6.	5.3.1.3 - Minor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Manajemen telah mempunyai SOP Pengamanan dan Perlindungan hutan, SOP No. 18/SOP-TTL/2011 Revisi 2 tanggal 01 April 2022. SOP tersebut mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur patroli dan pengamanan hutan - Pendekatan dan penyuluhan kepada masyarakat. - Pembuatan papan nama dan papan larangan Namun prosedur tersebut belum mencakup penanganan terhadap kegiatan penebangan ilegal; pemukiman ilegal; perburuan ilegal; perambahan dan kegiatan <i>nonprocedural</i> lainnya. 2. Pos Security dilengkapi dengan petugas security yang siapa berjaga selama 24 jam yang dibagi menjadi 2 shift 	<ul style="list-style-type: none"> • SOP Pengamanan dan Perlindungan hutan, SOP No. 18/SOP-TTL/2011 (revisi 3), diperbaharui dan disahkan tanggal 14 Juli 2023 telah mencakup penebangan ilegal; pemukiman ilegal; perburuan ilegal; • Ada Kerjasama dengan PT Mitra Animha Sejahtera untuk penyedia jasa security, terdapat 6 orang yang terbagi ke dalam 3 shift. • Berdasarkan hasil wawancara dengan MR dan didukung oleh Surat Manajer PT Mitra Animha Sejahtera nomor 01/MAS-

No	Klausul	Ketidaksesuaian	Hasil Verifikasi
		<p>sebanyak 5 orang, namun petugas security belum mengikuti Diklatsar Security yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang</p> <p>1. <i>The Management Unit has an SOP for forest security and protection, SOP No. 18/SOP-TTL/2011 Revision 2 dated April 01, 2022. The SOP includes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Forest patrol and security procedures - Community outreach and counseling. - Making nameplates and ban boards <p><i>However, these procedures do not cover handling illegal logging; illegal settlements; illegal hunting; encroachment and other non-procedural activities.</i></p> <p>2. <i>The security post is equipped with security officers who are on guard for 24 hours divided into 2 shifts of 5 people, but the security officers have not attended the Security Diklatsar organized by the authorized institution.</i></p>	<p>TTL/V/2024 perihal Data Informasi Tenaga Security yang bertugas di PT TTL tanggal 30 Mei 2024, diketahui bahwa 6 (enam) personel security PT Mitra Animha Sejahtera telah mengikuti DIKLATSAR Security yang dilaksanakan oleh Polda Papua bertempat di ASIKI, namun sertifikat masih dalam pengurusan di Polda Papua. Berdasarkan Surat Perjanjian Penyediaan Pengelolaan Jasa Pekerja Satuan Pengamanan antara PT TTL dan PT MAS nomor 07/SPK/PT.TTL/PT.MAS/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, dijelaskan bahwa pembinaan dan pelatihan menjadi tanggungjawab PT MAS (Pasal 3 ayat 3). (CLOSED)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>The Forest Security and Protection SOP, SOP No. 18/SOP-TTL/2011 (revision 3), updated and approved on July 14, 2023 has covered illegal logging; illegal settlement; illegal hunting;</i> • <i>There is cooperation with PT Mitra Animha Sejahtera for security service providers, there are 6 people divided into 3 shifts.</i> • <i>Based on the interview with MR and supported by the Manager Letter of PT Mitra Animha Sejahtera number 01/MAS-TTL/V/2024 regarding Information Data on Security Personnel assigned to PT TTL dated May 30, 2024, it is known that 6 (six) security personnel of PT Mitra Animha Sejahtera have attended the DIKLATSAR Security conducted by the Papua Police at ASIKI, but the certificate is still being processed at the Papua Police. Based on the Agreement Letter for the Provision of Management of Security Unit Worker Services between PT TTL and PT MAS number 07/SPK/PT.TTL/PT.MAS/II/2024 dated February 26, 2024, it is explained that coaching and training are the responsibility of PT MAS (Article 3 paragraph 3). (CLOSED)</i>
7.	5.3.4.1 - Minor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah memiliki SOP Alat Pelindung Diri (APD), namun belum mengatur mengenai jenis APD yang harus dipakai disetiap kegiatan dan masa pakai untuk masing-masing jenis APD. 2. Berdasarkan kunjungan ke persemaian Silin terdapat tiang atap pembibitan di tempat melintas pekerja yang posisinya rendah sehingga berpeluang terkena kepada orang yang melintas. 3. Berdasarkan kunjungan lapangan di TPK (operator alat berat wheel loader dan buldozer) belum tersedia tabung APAR dan kotak P3K di dalam unit. 4. Berdasarkan BA pemeriksaan kotak P3K, kunjungan lapangan di work shop dan kantor umum serta hasil wawancara dengan penanggung jawab P3K, kotak P3K yang terpasang belum sesuai dengan yang diatur dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • SOP Alat Pelindung Diri (APD), SOP P-TTL-K3-014 (revisi 01), diperbaharui dan disahkan pada 15 Maret 2024, telah mencakup jenis APD yang harus dipakai disetiap kegiatan dan masa pakai untuk masing-masing jenis APD. • Berdasarkan verifikasi lapangan, tiang atap pembibitan di tempat melintas pekerja yang posisinya rendah telah diperbaiki • Berdasarkan verifikasi lapangan TPK (operator alat berat) telah menyediakan tabung APAR dan kotak P3K di dalam unit • Berdasarkan verifikasi lapangan di workshop dan kantor umum, isi kotak P3K telah sesuai dengan Permenaker No.

No	Klausul	Ketidaksesuaian	Hasil Verifikasi
		<p>Permenaker No. 15/MEN/VIII/2008 dengan jumlah isi (item) sebanyak 21 jenis.</p> <p>5. Berdasarkan kajian dokumen pelaksanaan K3 dan hasil wawancara dengan perwakilan pekerja belum secara rutin melakukan sosialisasi K3L kepada pekerja di lapangan untuk melindungi dan mencegah pekerja dari risiko pekerjaannya</p> <p>1. <i>They already have a Personal Protective Equipment (PPE) SOP, but it does not regulate the type of PPE that must be used in each activity and the service life for each type of PPE.</i></p> <p>2. <i>Based on a visit to the Silin nursery, there was a nursery roof pole in a low position where workers were passing by, so there was a chance of being exposed to people passing by.</i></p> <p>3. <i>Based on field visits at the TPK (wheel loader and bulldozer operators) there are no fire extinguishers and first aid kits available in the unit.</i></p> <p>4. <i>Based on BA inspection of first aid kits, field visits in work shops and general offices and the results of interviews with the person in charge of first aid, the installed first aid kits are not in accordance with those stipulated in Permenaker No. 15/MEN/VIII/2008 with a total of 21 types of contents (items).</i></p> <p>5. <i>Based on the review of OHS implementation documents and the results of interviews with worker representatives, OHS socialization has not been routinely conducted to workers in the field to protect and prevent workers from the risks of their work.</i></p>	<p>15/MEN/VIII/2008 dengan jumlah isi (item) sebanyak 21 jenis.</p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil wawancara dengan para karyawan, dikonfirmasi bahwa mereka mendapatkan sosialisasi K3L setiap hari Ketika pelaksanaan apel / briefing, selain itu bukti pelaksanaan sosialisasi K3L juga tertuang dalam Laporan P2K3 triwulan I tahun 2024 meliputi laporan, BA dan foto. (CLOSED) <i>The Personal Protective Equipment (PPE) SOP, SOP P-TTL-K3-014 (revision 01), updated and approved on March 15, 2024, includes the types of PPE that must be worn in each activity and the service life for each type of PPE.</i> <i>Based on field verification, the roof pole of the nursery where workers were passing by that was in a low position has been repaired.</i> <i>Based on field verification, TPK (heavy equipment operator) has provided fire extinguisher and first aid kit in the unit.</i> <i>Based on field verification in workshops and general offices, the contents of the first aid kit are in accordance with Permenaker No. 15/MEN/VIII/2008 with 21 types of contents (items).</i> <i>Based on the results of interviews with employees, it was confirmed that they received HSE socialization every day during the implementation of the apple / briefing, besides that evidence of the implementation of HSE socialization is also contained in the P2K3 Report for the first quarter of 2024 including reports, BA and photos. (CLOSED)</i>
8.	5.3.4.2 - Minor	<p>Berdasarkan kunjungan lapangan (tempat kerja Bengkel, dan lingkungan pemukiman karyawan), diketahui terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip K3L dan standar ini, diantaranya:</p> <p>1. Belum tersedia tong sampah organik dan anorganik serta belum memiliki Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA), sehingga masih ditemukan pencampuran sampah organik, anorganik serta LB3.</p> <p>2. Perlu peningkatan kebersihan dan kerapian kompleks perumahan, masih ditemukan sampah berserakan dan pembuangan sampah kategori LB3 (TV, kulkas dan mesin cuci) serta cecekan sampah plastik di pelabuhan ikan atau pasar Bastop di Kampung Kanggup KM 56.</p> <p>3. Perlu dibuatkan jembatan kayu di samping perumahan mess Jambu dikarenakan warga menggunakan pipa air sebagai jalan yang memiliki resiko terpeleset.</p> <p>4. Telah tersedia toilet di pabrik untuk karyawan industri, perlu penambahan fasilitas toilet untuk karyawan kantor sehingga tidak perlu berjalan jauh ke toilet milik pabrik.</p> <p>5. Belum dilakukan uji kualitas air baku yang dimanfaatkan oleh karyawan (air minum dan untuk MCK).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan verifikasi lapangan, telah tersedia tong sampah organik dan anorganik serta Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA), dan tidak lagi ditemukan adanya pencampuran sampah organik, anorganik serta LB3. Selain itu juga telah diverifikasi pada kompleks perumahan bahwa tidak ditemukan lagi adanya sampah berserakan dan pembuangan sampah kategori LB3 (TV, kulkas dan mesin cuci), Terkait dengan pasar Bastop tidak mendapatkan izin dari aparat keamanan untuk dikunjungi karena alasan keamanan, dimana areal Bastop merupakan akses ke perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Terkait jembatan kayu di samping perumahan mess Jambu sudah diperbaiki dan lebih memadai. Hasil verifikasi bahwa di kantor PT TTL tersedia toilet sebanyak 1 unit, di ruangan

No	Klausul	Ketidaksesuaian	Hasil Verifikasi
		<p><i>Based on field visits (Workshop workplace, and employee residential environment), it was found that there were several things that were not in accordance with the principles of HSE and this standard, including:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. There are no organic and inorganic waste bins and no Final Waste Disposal Site (TPSA), so there is still mixing of organic, inorganic and LB3 waste.</i> <i>2. Need to improve the cleanliness and tidiness of the housing complex, there are still found scattered garbage and LB3 category waste disposal (TV, refrigerator and washing machine) as well as plastic waste splashes at the fish port or Bastop market in Kanggup KM 56 village.</i> <i>3. It is necessary to build a wooden bridge next to the Jambu mess housing because residents use water pipes as a road that has a risk of slipping.</i> <i>4. There are already toilets available at the factory for industrial employees, there is a need to add toilet facilities for office employees so that they do not have to walk far to the factory's toilets.</i> <i>5. The quality of raw water used by employees (drinking water and toilets) has not been tested.</i> 	<p>logistic 1 unit, di perbengkelan 1 unit. Sedangkan untuk perumahan, masing-masing tersedia 1 unit. Terkait toilet di areal industry telah tersedia 8 unit toilet Perempuan dan 6 unit toilet laki-laki.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah tersedia uji kualitas air minum yang dimanfaatkan karyawan dari water point PT TTL, dibuktikan dengan sertifikat hasil analisis nomor NLI 23110016 laboratorium NUSALAB, Bogor tanggal 23 November 2023, nomor akreditasi KAN LP-1365-IDN. Adapun hasil analisa pada 19 parameter masih berada pada ambang baku mutu yang ditetapkan. (CLOSED) • <i>Based on field verification, organic and inorganic waste bins and Final Waste Disposal Sites (TPSA) are available, and no mixing of organic, inorganic and LB3 waste is found. In addition, it has also been verified in the housing complex that there is no longer any scattered garbage and disposal of LB3 category waste (TV, refrigerator and washing machine), related to the Bastop market did not get permission from the security forces to visit for security reasons, where the Bastop area is access to the border of Indonesia and Papua New Guinea.</i> • <i>The wooden bridge next to the Jambu mess housing has been repaired and is more adequate.</i> • <i>The verification result shows that there is 1 unit of toilet in PT TTL office, 1 unit in logistic room, 1 unit in workshop. As for housing, 1 unit each is available. Regarding toilets in the industrial area, 8 units of female toilets and 6 units of male toilets are available.</i> • <i>The quality test of drinking water used by employees from the PT TTL water point is available, as evidenced by the certificate of analysis number NLI 23110016 NUSALAB laboratory, Bogor dated November 23, 2023, KAN accreditation number LP-1365-IDN. The analysis results on 19 parameters are still at the specified quality standard threshold. (CLOSED)</i>
9.	5.3.4.3 - Minor	<p>Perusahaan harus menjamin bahwa semua APD dibagikan secara cuma-cuma kepada semua karyawan serta dipastikan selalu dipakai pada saat bekerja. Berdasarkan kunjungan lapangan di TPn RKT 2023, operator chain saw (Johanes Kesuman) dan pemasang paku S (Wilhemus) tidak menggunakan helm dan sarung tangan, pekerja welder (Amir Bahar) dan mekanik (Martinus Kali) tidak menggunakan helm dan helper wheel loader (Stave) tidak menggunakan helm dan sarung tangan.</p> <p><i>The company should ensure that all PPE is distributed free of charge to all employees and that it is always worn at work. Based</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • PT TTL telah melakukan pengadaan APD sebagaimana dilaporkan dalam Laporan P2K3 triwulan I 2024, pengadaan APD dilakukan pada tanggal 25 Maret 2024 meliputi Helmet safety, Ear Plug, rompi, safety shoes, safety boots, sarung tangan kain, mantel/jas hujan dan kacamata welding. Hasil verifikasi lapangan pada blok terbangun dan TPK ditemukan bahwa pekerja telah mengenakan APD yang sesuai. (CLOSED)

No	Klausul	Ketidaksesuaian	Hasil Verifikasi
		<p>on the field visit at TPn RKT 2023, the chain saw operator (Johanes Kesuman) and S-nail installer (Wilhemus) were not wearing helmets and gloves, the welder (Amir Bahar) and mechanic (Martinus Kali) were not wearing helmets and the wheel loader helper (Stave) was not wearing a helmet and gloves.</p>	<ul style="list-style-type: none"> PT TTL has procured PPE as reported in the P2K3 Report for the first quarter of 2024, PPE procurement was carried out on March 25, 2024 including safety helmets, earplugs, vests, safety shoes, safety boots, cloth gloves, coats/raincoats and welding glasses. The results of field verification in the felling block and TPK found that workers had worn the appropriate PPE. (CLOSED)
10.	6.1.1 - Minor	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan training K3 pesawat angkat dan pesawat angkut pada tahun 2022 sebanyak 17 orang, berdasarkan hasil penelusuran dokumen dan wawancara dengan operator masih ditemukan operator alat berat wheel loader an. M. Yusuf belum memiliki SIO operator dan juru las di work shop an. Amir Bahar belum dapat menunjukan training juru las (Whelder). Belum dapat menunjukan Surat Ijin Layak Operasi (SILO) atau riksa uji alat berat sesuai dengan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1970 mengenai Keselamatan Kerja. Peraturan pelaksanaan ada di Permenaker Nomor 4/MENAKER/85 mengenai Pesawat Angkat Angkut. K3 training for lifting and transporting aircraft has been carried out in 2022 for 17 people, based on the results of document searches and interviews with operators, it was still found that the operator of the heavy wheel loader an. M. Yusuf does not yet have an SIO operator and a welder in the work shop an. Amir Bahar has not been able to show the training of welders (Whelder). Unable to show a Letter of Permit for Operation (SILO) or heavy equipment test as stipulated in Law Number 1 Year 1970 regarding Occupational Safety. The implementing regulations are in Permenaker No. 4/MENAKER/85 regarding heavy equipment and Transport. 	<ul style="list-style-type: none"> PT Tunas Timber Lestari telah merealisasikan pelatihan K3 pesawat angkat dan pesawat angkut tahun 2022 sebanyak 17 orang, Pada Oktober 2023 sebanyak 3 orang operator dan 1 orang juru las, dengan demikian total operator yang telah mengikuti pelatihan adalah sebanyak 21 orang terdiri dari 20 orang operator dan 1 juru las. Kemudian pada Oktober 2023 terjadi restrukturisasi dan sebanyak 7 orang tidak direkrut kembali dan 2 orang mutasi ke PT Inocin Abadi. Sehingga, saat ini total 11 operator dan 1 juru las. Saat ini dari total 29 operator yang bekerja di PT TTL, masih terdapat 18 orang karyawan yang belum memiliki SIO. PT Tunas Timber Lestari pada tahun 2024 kembali merencanakan ulang penyelesaian pemenuhan SIO dan SILO setelah selesainya restrukturisasi Perusahaan, dibuktikan dengan adanya proposal pemenuhan persyaratan sertifikasi SIO dan SILO PT Tunas Timber Lestari, dengan total pengajuan 18 SIO dan 31 SILO dengan total pengajuan biaya sebesar Rp 64.000.000,- ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 01 November 2023. (CLOSED) PT Tunas Timber Lestari has realized K3 training for lifting and transporting aircraft in 2022 as many as 17 people, in October 2023 as many as 3 operators and 1 welder, thus the total operators who have attended the training are 21 people consisting of 20 operators and 1 welder. Then in October 2023 there was a restructuring and as many as 7 people were not recruited and 2 people transferred to PT Inocin Abadi. Thus, there are currently a total of 11 operators and 1 welder. Currently, out of a total of 29 operators working at PT TTL, there are still 18 employees who do not have SIO. PT Tunas Timber Lestari in 2024 re-planned the completion of SIO and SILO fulfillment after the completion of the Company's restructuring, as evidenced by the proposal to fulfill the SIO and SILO certification requirements of PT Tunas Timber Lestari, with a total submission of 18

No	Klausul	Ketidaksesuaian	Hasil Verifikasi
			<i>SIO and 31 SILO with a total submission cost of Rp 64,000,000, - signed by the Director on November 01, 2023. (CLOSED)</i>
11.	7.1.2 - Minor	<p>Unit Manajemen belum melakukan identifikasi dan penghitungan emisi GRK pada penerapan teknik RIL untuk areal pengelolaannya sehingga pengelolaan silvikultur belum mempertimbangkan kemampuan optimal hutan dalam menyimpan karbon</p> <p><i>The Management Unit has not identified and calculated GHG emissions in the application of RIL techniques for its management area so that silvicultural management has not considered the optimal ability of the forest to store carbon.</i></p>	<p>PT Tunas Timber Lestari telah melakukan perhitungan stok karbon pada areal kerjanya secara mandiri dengan menggunakan peta penutupan lahan hasil penafsiran Citra Sentinel Scan ID T54MVU liputan tanggal 1 Mei 2022 dan 19 September 2022. Dasar perhitungan karbon masih menggunakan referensi data karbon per hektar Tier 1 dan Tier 2 pada Buku Kegiatan Serapan dan Emisi Carbon Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK tahun 2015. Berdasarkan perhitungan didapatkan data cadangan karbon pada areal kerja PT Tunas Timber Lestari, sebesar 34.694.217 ton CO2 Eq pada tahun 2018 dan 34.428.370 ton CO2 eq pada tahun 2022. (CLOSED)</p> <p><i>PT Tunas Timber Lestari has independently calculated the carbon stock in its working area by using the land cover map from the interpretation of Sentinel Scan Image ID T54MVU coverage dated May 1, 2022 and September 19, 2022. The basis of carbon calculation still uses the reference of carbon data per hectare Tier 1 and Tier 2 in the Carbon Uptake and Emission Activity Book of the Directorate of Forest Resources Inventory and Monitoring of the Directorate General of Forestry Planning and Environmental Governance of the MoEF in 2015. Based on the calculation obtained carbon reserve data in the PT Tunas Timber Lestari work area, amounting to 34,694,217 tons CO2 Eq in 2018 and 34,428,370 tons CO2 eq in 2022. (CLOSED)</i></p>
12.	7.1.3 - Minor	<p>Unit Manajemen telah menerapkan seluruh tahapan system silvikultur TPTI dan TPTJ serta telah diimplementasikan di lapangan. Tetapi dalam rangka pengelolaan hutan yang berkontribusi secara langsung terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dan penggunaan sumber daya secara efisien, PT TTL belum melakukan penghitungan emisi GRK pada penerapan Teknik RIL di dalam areal konsesinya dan PT TTL belum melakukan identifikasi sumber emisi GRK, rencana mitigasi emisi GRK, dan menentukan aksi mitigasi emisi GRK.</p> <p><i>The Management Unit has implemented all stages of the TPTI and TPTJ silviculture system and has been implemented in the field. However, in the context of forest management that directly contributes to the reduction of greenhouse gas emissions and efficient use of resources, PT TTL has not calculated GHG emissions in the application of the RIL Technique in its concession area and PT TTL has not identified sources of GHG emissions, GHG emission mitigation plans, and determined GHG emission mitigation actions.</i></p>	<p>PT Tunas Timber Lestari telah melakukan perhitungan stok karbon tinggi, dan penghitungan emisi GRK, identifikasi sumber emisi GRK, dan rencana mitigasi emisi GRK, walaupun masih dilakukan secara global berdasarkan kondisi penutupan lahan di areal PT Tunas Timber Lestari.</p> <p>Dari data yang disampaikan diketahui bahwa, total cadangan karbon berdasarkan tutupan lahan tahun 2018 pada areal kerja PT Tunas Timber Lestari sebesar 34.694.217 ton CO2 eq, sehingga jika dibandingkan dengan data karbon stok pada tahun 2022 yang sebesar 34.428.370 ton CO2 eq, terjadi emisi sebesar 265.848 ton CO eq (berdasarkan tutupan lahan dari tahun 2018-2022). Emisi yang terjadi akibat perubahan tutupan lahan kelas hutan primer menjadi hutan lahan kering sekunder, yaitu sebesar 445.995 ton C atau sekitar 4.16 ton C/Ha.</p>

No	Klausul	Ketidaksesuaian	Hasil Verifikasi
			<p>PT Tunas Timber Lestari telah melakukan identifikasi sumber emisi, diantaranya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktifitas logging mulai dari penebangan, penyaradan, pengangkutan dan pembuatan jalan angkutan 2. Penebangan konvensional (tidak menerapkan penebangan ramah lingkungan) 3. Aktifitas masyarakat pembukaan lahan 4. Bahan bakar dari peralatan logging <p>Adapun rencana aksi mitigasi GRK, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Teknik Reduced Impact Logging (RIL) dalam kegiatan pemanfaatan hutan 2. Penyuluhan kepada masyarakat untuk tidak membakar hutan dan lahan 3. Efisiensi penggunaan bahan bakar bak untuk alat berat maupun genset 4. Penanaman dan rehabilitasi tanah terbuka <p>Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, PT Tunas Timber Lestari telah melaksanakan aksi mitigasi emisi GRK berupa implementasi penebangan ramah lingkungan (RIL), penanaman pengayaan/rehabilitasi, penanaman kanan kiri jalan di areal bekas tebangan, penanaman TPTJ dan penanaman rehabilitasi di areal KPPN. (CLOSED)</p> <p><i>PT Tunas Timber Lestari has carried out high carbon stock calculations, and GHG emission calculations, identification of GHG emission sources, and GHG emission mitigation plans, although still carried out globally based on land cover conditions in the PT Tunas Timber Lestari area.</i></p> <p><i>From the data submitted, it is known that the total carbon stock based on land cover in 2018 in the PT Tunas Timber Lestari work area is 34,694,217 tons CO₂ eq, so when compared to carbon stock data in 2022 which amounted to 34,428,370 tons CO₂ eq, there were emissions of 265,848 tons CO₂ eq (based on land cover from 2018-2022). Emissions that occur due to land cover change from primary forest class to secondary dryland forest, amounting to 445,995 tons C or about 4.16 tons C/Ha.</i></p> <p><i>PT Tunas Timber Lestari has identified emission sources, including:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Logging activities ranging from logging, skidding, transportation and making transportation roads 2. Conventional logging (not applying environmentally friendly logging) 3. Land clearing community activity 4. Fuel from logging equipment <p><i>The GHG mitigation action plan is as follows:</i></p>

No	Klausul	Ketidaksesuaian	Hasil Verifikasi
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Application of Reduced Impact Logging (RIL) technique in forest utilization activities 2. Counseling the community not to burn forests and land 3. Efficient use of fuel for both heavy equipment and generators 4. Planting and rehabilitation of open land <p>Based on the results of field verification, PT Tunas Timber Lestari has carried out GHG emission mitigation actions in the form of implementation of environmentally friendly logging (RIL), enrichment/rehabilitation planting, planting right and left of the road in the former logging area, planting TPTJ and rehabilitation planting in the KPPN area. (CLOSED)</p>
13.	7.2.2 - Minor	<p>Unit Manajemen telah melakukan pengelolaan flora dan fauna melalui kegiatan monitoring dan pemantauan flora dan fauna di dalam areal KPPN dan KPPS dan telah dituangkan dalam Laporan Kegiatan KPPN Pengambilan Tahap XII dan Laporan Kegiatan Inventarisasi KPPS ke-XI. Lokasi kegiatan identifikasi dan inventarisasi flora dan fauna di KPPN dilaksanakan pada petak FF 53 dan FF 54 pada Bulan November 2022 dan KPPS pada Petak II 61, II 62 dan HH 63 pada bulan Desember 2022. Berdasarkan dokumen Laporan tersebut sudah ada analisa struktur tegakan secara vertical, yaitu: semai, pancang, tiang dan pohon, namun belum terdapat analisis keragaman jenis, analisis status perlindungan baik berdasarkan peraturan pemerintah maupun status IUCN dan CITES. Selain itu kegiatan identifikasi belum dilakukan pada seluruh kawasan lindung yang ada di areal PT TTL</p> <p><i>The Management Unit has carried out flora and fauna management through monitoring and monitoring of flora and fauna in the KPPN and KPPS areas and has been outlined in the Phase XII Retrieval KPPN Activity Report and the XI KPPS Inventory Activity Report. The location of flora and fauna identification and inventory activities at KPPN was carried out on plots FF 53 and FF 54 in November 2022 and KPPS on Plots II 61, II 62 and HH 63 in December 2022. Based on the Report document, there has been an analysis of the vertical stand structure, namely: seedlings, saplings, poles and trees, but there is no analysis of species diversity, analysis of protection status both based on government regulations and IUCN and CITES status. In addition, identification activities have not been carried out in all protected areas in the PT TTL area.</i></p>	<p>PT TTL telah melakukan identifikasi flora dan fauna di KPPN yang dilaksanakan mulai tanggal 20 Oktober – 13 November 2023. Tersedia dokumen terdokumentasi berupa Laporan Kegiatan KPPN (Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah) PT TTL Tahap XIII, lokasi kegiatan identifikasi dan inventarisasi flora dan fauna di KPPN dilaksanakan pada petak AZ 53, AZ 54 dan AZ 55. Sudah ada analisa struktur vertikal tegakan (semai, pancang, tiang dan pohon), dan telah dilakukan analisis keragaman jenis, analisis status perlindungan baik berdasarkan peraturan pemerintah maupun status IUCN dan CITES. Serta indeks keanekaragaman spesiesnya.</p> <p>Kegiatan identifikasi telah dilakukan juga pada kawasan lindung Kawasan Konservasi Insitu (KKI) dan sempadan sungai. Pada kawasan lindung lainnya telah direncanakan pemantauan dengan menggunakan kamera trap. (CLOSED)</p> <p><i>PT TTL has identified flora and fauna at KPPN which was carried out from October 20 - November 13, 2023. There are documented documents in the form of PT TTL Phase XIII KPPN (Germplasm Preservation Area) Activity Report, the location of flora and fauna identification and inventory activities at KPPN is carried out on plots AZ 53, AZ 54 and AZ 55. There has been an analysis of the vertical structure of stands (seedlings, saplings, poles and trees), and species diversity analysis has been carried out, analysis of protection status both based on government regulations and IUCN and CITES status. As well as the species diversity index.</i></p> <p><i>Identification activities have also been carried out in the protected areas of Insitu Conservation Areas (ICCs) and riverbanks. In other protected areas, monitoring using camera traps is planned. (CLOSED)</i></p>

No	Klausul	Ketidaksesuaian	Hasil Verifikasi
14.	7.3.1 - Minor	<p>Unit Manajemen telah menerbitkan SOP Pengayaan dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan No. 08/SOP-TTL/2011 Revisi 02 tanggal 01 April 2022, dalam Prosedur Kerja, Pelaksanaan Kegiatan (b) (1) Mencari lokasi petak ukur dan tanda/ajir pada jalan sarad dan sekitar tunggak pohon yang ditebang yang dipasang pada saat pelaksanaan perapihan, namun dalam SOP belum mencantumkan terkait Peta Rencana Pengayaan yang dibuat berdasarkan hasil Perapihan (berdasarkan Peta Penyebaran Pohon) sesuai dengan P8 Tahun 2021, Lampiran 10 Pedoman Silvikultur (5) (b.2). Hasil pemeriksaan lapangan pada petak AT-48 blok RKT 2022 koordinat 06°18'16,7" S dan 140°50'01,5" E terdapat areal terbuka disekitar tunggak tebang yang belum dilaksanakan penanaman pengayaan</p> <p><i>The Management Unit has issued an SOP for Enrichment and Maintenance of Enrichment Plants No. 08/SOP-TTL/2011 Revision 02 dated April 01, 2022, in Work Procedures, Activity Implementation (b) (1) Finding the location of measuring plots and signs/ajirs on the sarad road and around felled tree stumps installed during the implementation of tidying, but the SOP does not include related Enrichment Plan Maps made based on the results of Tidying (based on Tree Distribution Maps) in accordance with P8 of 2021, Appendix 10 Silviculture Guidelines (5) (b.2). The results of field inspection on plot AT-48 of RKT block 2022 coordinates 06°18'16.7"S and 140°50'01.5"E there are open areas around the felling stumps that have not been planted enrichment.</i></p>	<p>Telah ditunjukkan SOP Pengayaan dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan No. 08/SOP-TTL/2011 yang telah direvisi dengan mencantumkan Peta Rencana Pengayaan dari hasil Perapihan dengan menggunakan informasi Peta Penyebaran Pohon dari hasil penebangan. Hasil pemeriksaan lapangan pada koordinat 06°24' 32,144" S dan 140° 44' 18,218" E telah dilakukan penanaman. (CLOSED)</p> <p><i>The revised SOP for Enrichment and Maintenance of Enrichment Plants No. 08/SOP-TTL/2011 has been shown by including the Enrichment Plan Map from the results of Tidying using the Tree Distribution Map information from the logging results. The results of field inspection at coordinates 06°24' 32.144" S and 140° 44' 18.218" E have been planted. (CLOSED)</i></p>
15.	7.3.6 - Minor	<p>Unit Manajemen telah menerbitkan SOP Lacak Balak No. 63/SOP/PRC-TTL/2023 Revisi 0 tanggal 2 Januari 2023, namun belum dapat ditunjukkan struktur organisasi terkait lacak balak dan hasil monitoring dan evaluasi lacak balak Hasil uji petik tunggak dilapangan pada Blok RKTPH 2023 untuk Kayu Bulat dapat ditelusuri namun untuk penelusuran asal petak limbah pembalakan tidak dapat ditelusuri</p> <p><i>The Management Unit has issued Chain of Custody SOP No. 63/SOP/PRC-TTL/2023 Revision 0 dated January 2, 2023, but the organizational structure related to chain of custody and the results of monitoring and evaluation of chain of custody have not been shown. The results of the stump test in the field in RKTPH Block 2023 for Logs can be traced but for tracing the origin of logging waste plots cannot be traced.</i></p>	<p>Telah ditunjukkan SOP Lacak Balak No. 63/SOP/PRC-TTL/2023 Revisi 1 tanggal 5 Juli 2023 yang telah mencantumkan terkait organisasi lacak balak dan Monev Lacak Balak untuk kayu tebang dan limbah pembalakan. Hasil pemeriksaan dengan menggunakan dokumen Peta Penyebaran Pohon Petak AF 44, SKSHH KB.C.3713868, DKB No. 404/DKB-TPTJ-SILIN/V/2024. 25-5-2024, Buku Ukur dan LHP atas Nomor Pohon dengan ID Barcode1165442 dan1165441. terhadap nomor pohon tersebut, dengan menggunakan peta penyebaran pohon, keberadaan tunggak dilapangan dapat ditelusuri. Dilapangan pada petak AG 44 terdapat tumpukan limbah pembalakan Nomor 16. Koordinat 06° 24' 39,659" S dan 140° 47' 23,034" E. (CLOSED)</p> <p><i>The Chain of Custody SOP No. 63/SOP/PRC-TTL/2023 Revision 1 dated July 5, 2023 has been shown which includes chain of custody organization and Chain of Custody M&E for felled timber and logging waste. The results of the inspection using the AF 44 Plots Tree Distribution Map document, SKSHH KB.C.3713868, DKB No. 404/DKB-TPTJ-SILIN/V/2024. 25-5-2024, Measurement Book and LHP on Tree Numbers with ID Barcodes1165442 and1165441. against these tree</i></p>

No	Klausul	Ketidaksesuaian	Hasil Verifikasi
			<i>numbers, using the tree distribution map, the presence of stumps in the field can be traced. In the field on plot AG 44 there is a pile of logging waste Number 16. Coordinates 06°24'39.659" S and 140°47'23.034" E. (CLOSED)</i>
16.	7.4.2 - Minor	<p>Unit Manajemen telah melakukan studi Nilai Konservasi Tinggi dan telah disusun Laporan Penilaian Konservasi Tinggi (NKT) di Areal PBPH PT TTL oleh Tropical Forest Foundation dengan mengikuti panduan Pola Acu Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi yang diterbitkan oleh HCV Resource Network Assessor Licensing Schema (HCVRN-ALS) tanggal 5 September 2014. Peilaian NKT telah dilakukan pada Bulan Februari 2020 – April 2021.</p> <p>Berdasarkan hasil studi NKT tersebut, terdapat beberapa NKT pada areal PT TTL, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NKT 1: 1.1, 1,3 dan 1.4 seluas 110.305,61 Ha 2. NKT 2: 2.1, 2.2 dan 2.3 seluas 110.305,61 Ha 3. NKT 3 seluas 25.038,35 Ha 4. NKT 4: 4.1, 4.2 dan 4.3 seluas 90.587,15 Ha 5. NKT 5 seluas 35.609,13 Ha 6. NKT 6 seluas 5,30 Ha <p>Namun berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara diketahui bahwa belum ada implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan NKT sebagaimana yang telah direkomendasikan dalam dokumen studi NKT</p> <p><i>The Management Unit has conducted a High Conservation Value study and a High Conservation Value (HCV) Assessment Report has been prepared in the PT TTL PBPH Area by the Tropical Forest Foundation following the guidelines of the High Conservation Value Assessment Report Template published by the HCV Resource Network Assessor Licensing Schema (HCVRN-ALS) dated September 5, 2014. The HCV assessment was conducted in February 2020 - April 2021. Based on the results of the HCV study, there are several HCVs in the PT TTL area, as follows:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. HCV 1: 1.1, 1.3 and 1.4 covering 110,305.61 Ha 2. HCV 2: 2.1, 2.2 and 2.3 covering 110,305.61 Ha 3. HCV 3 covering 25,038.35 Ha 4. HCV 4: 4.1, 4.2 and 4.3 covering 90,587.15 Ha 5. HCV 5 covering 35,609.13 Ha 6. HCV 6 covering 5.30 Ha <p><i>However, based on the results of document verification and interviews, it is known that there has been no implementation of HCV management and monitoring activities as recommended in the HCV study document.</i></p>	<p>PT TTL telah melakukan kegiatan pengeblaan dan pemantauan NKT sebagaimana yang telah direkomendasikan dalam dokumen studi NKT. Terdapat bukti dokumen Laporan Pelaksanaan Rekomendasi Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) PT Tunas Timbewr Lestari Tahun 2023. Dalam laporan tersebut telah dilaporkan kegiatan-kegiatan implementasi pengelolaan NKT di lapangan pada seluruh NKT yang berada di areal PT TTL. (CLOSED)</p> <p><i>PT TTL has conducted HCV management and monitoring activities as recommended in the HCV study document. There is documentary evidence of the PT Tunas Timbewr Lestari High Conservation Value (HCV) Area Management and Monitoring Recommendation Implementation Report Year 2023. In the report, HCV management implementation activities in the field have been reported on all HCVs located in the PT TTL area. (CLOSED)</i></p>
17.	7.6.3 - Minor	<p>Perlu peningkatan program CSR/CSC untuk pemberdayaan masyarakat serta belum dapat menunjukkan rekaman pertemuan dengan masyarakat setempat dalam rangka penyusunan program pemberdayaan masyarakat.</p> <p><i>Need to increase CSR/CSC programs for community empowerment and have not been able to show recordings of meetings with local communities in the context of preparing community empowerment programs.</i></p>	<p>Laporan realisasi program CSC pada tahun 2022 adalah sebesar Rp.144.360.500,-. Dari rencana sebesar Rp. 133.100.000,- sehingga pada tahun 2022 realisasi CSR sudah melebihi target dari yang direncanakan (>100%) Sedangkan, berdasarkan laporan realisasi CSC tahun 2023, terdapat penurunan dimana realisasinya sebesar sebesar Rp.130.262.500,- dari rencana Rp. 173.220.000,- (75%). Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil manajemen, rencana CSC terdiri dari rencana</p>

No	Klausul	Ketidaksesuaian	Hasil Verifikasi
			<p>bantuan infrastruktur dan non infrastruktur, dimana rencana infrastruktur lebih tinggi rencana biayanya. Berdasarkan laporan keuangan yang ditunjukkan, perusahaan mengalami kerugian pada kurun waktu dua tahun terakhir, sehingga realisasi CSR tahun 2023 ditekankan pada bantuan non infrastruktur.</p> <p>Meskipun demikian, terdapat peningkatan realisasi kontribusi berupa pelayanan Kesehatan gratis selama tahun 2023 mencapai 1.839 orang atau pelayanan dengan total biaya Rp. 10.629.766,- dan posyandu telah melayani 456 kunjungan balita. Selain itu, beberapa bantuan pogram CSC (non infrastruktur) 2023 telah terealisasi sebesar >100% dari rencana, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bantuan Pendidikan sebesar Rp 43.000.000,- - Bantuan budaya/keagamaan sebesar Rp. 30.875.000,- - Bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan sebesar Rp. 44.262.500,- <p>PT Tunas Timber Lestari telah melaksanakan Sosialisasi Rencana Kegiatan Cooperate Social Contribution (CSC) tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2023 berlokasi di kantor Camp PT TTL. Dalam sosialisasi tersebut, masyarakat diinformasikan mengenai rencana kegiatan CSC, adapun rencana yang disampaikan meliputi bantuan bidang Pendidikan, Kesehatan, ekonomi dan infrastruktur. Bukti sosialisasi didokumentasikan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan Pemilik Hak Ulayat dan Kasie Humas, dilengkapi dengan daftar hadir (23 orang terdiri dari marga-marga terdampak RKT 2024) dan foto kegiatan. (CLOSED)</p> <p><i>The realization report of the CSC program in 2022 was Rp.144,360,500,-. From the plan of Rp. 133,100,000, - so that in 2022 the realization of CSR has exceeded the target of the planned (>100%).</i></p> <p><i>Meanwhile, based on the CSC realization report in 2023, there was a decrease where the realization amounted to Rp.130,262,500, -from the plan of Rp. 173,220,000, - (75%).</i></p> <p><i>Based on the interview with the management representative, the CSC plan consists of infrastructure and non-infrastructure assistance plans, where the infrastructure plan is higher than the cost plan. Based on the financial statements shown, the company has experienced losses in the last two years, so the realization of CSR in 2023 is emphasized on non-infrastructure assistance.</i></p> <p><i>Nevertheless, there was an increase in the realization of contributions in the form of free</i></p>

No	Klausul	Ketidaksesuaian	Hasil Verifikasi
			<p>health services during 2023 reaching 1,839 people or services with a total cost of Rp. 10,629,766, - and posyandu has served 456 visits of toddlers. In addition, several CSC (non-infrastructure) assistance programs in 2023 have been realized at >100% of the plan, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Education Assistance amounting to IDR 43,000,000,- - Cultural/religious assistance amounting to Rp. 30,875,000,- - Social assistance and poverty alleviation amounting to Rp. 44,262,500,- <p>PT Tunas Timber Lestari has carried out the Socialization of the Cooperate Social Contribution (CSC) Activity Plan for 2024 which was held on November 25, 2023 located at the PT TTL Camp office. In the socialization, the community was informed about the CSC activity plan, while the plans submitted included assistance in the fields of Education, Health, economy and infrastructure. Evidence of socialization is documented in the form of minutes signed by representatives of Customary Rights Owners and Head of Public Relations, equipped with an attendance list (23 people consisting of clans affected by the 2024 RKT) and photos of activities. (CLOSED)</p>
18.	8.1.1 - Minor	<p>Unit Manajemen telah menerbitkan SOP Tim Evaluasi Kegiatan Perencanaan dan Produksi No. 05/SOP-TTL/2011 Revisi 02 tanggal 01 April 2022, namun belum dapat ditunjukkan hasil Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi dari hasil pelaksanaan kegiatan Tim Evaluasi Kegiatan Perencanaan dan Produksi Tahun 2022 (Produksi)</p> <p><i>The Management Unit has issued the SOP for the Evaluation Team of Planning and Production Activities No. 05/SOP-TTL/2011 Revision 02 dated April 01, 2022, but the results of monitoring, measurement, analysis and evaluation of the results of the implementation of the activities of the Evaluation Team of Planning and Production Activities in 2022 (Production) have not yet been shown.</i></p>	<p>Telah ditunjukkan Laporan Monev:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persemaian, tgl 1-1-2024 b. Penanaman Kika, Pengayaan/Rehabilitasi, Pemeliharaan, tgl19-1-2024 c. Cheking Penataan Batas Areal Kerja blk 2025 tgl 8-1-2024 d. Cheking ITSP 2024 tgl 24-11-2023 e. Kegiatan RIL RKTTPH 2023 tgl Monev 18-1-2024 f. Monev Kegiatan Sosial 2023, tgl 8 Januari 2024 <p>Monev Kegiatan Sosial Triwulan I 2024, tgl 8-4-2024. (CLOSED)</p> <p>M&E report has been shown:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nursery, 1-1-2024 b. Kika Planting, Enrichment/Rehabilitation, Maintenance, dated 19-1-2024 c. Cheking of Work Area Boundary Arrangement of block 2025 on 8-1-2024 d. Cheking ITSP 2024 on 24-11-2023 e. RIL RKTTPH 2023 activities Monev date 18-1-2024 f. Monev of Social Activities 2023, January 8, 2024 <p>Monev of Social Activities for the first quarter of 2024, on 8-4-2024. (CLOSED)</p>
19.	8.1.1 - Minor	<p>Unit Pengelola telah melakukan penilaian dampak sosial/Social Impact Assesment/SIA dan terdapat rekomendasi pengelolaan</p>	<p>PT TTL telah melaksanakan rekomendasi SIA, dibuktikan dengan laporan pelaksanaan rekomendasi SIA tahun 2023. (CLOSED)</p>

No	Klausul	Ketidaksesuaian	Hasil Verifikasi
		<p>dampak sosial, pihak PT TTL belum dapat menunjukkan laporan pelaksanaan rekomendasi dokumen SIA (Sosial)</p> <p><i>The Management Unit has conducted a social impact assessment (SIA) and there are recommendations for social impact management, PT TTL has not been able to show a report on the implementation of the SIA document recommendations. (Social)</i></p>	<p><i>PT TTL has implemented the SIA recommendations, evidenced by the SIA recommendation implementation report in 2023. (CLOSED)</i></p>
20.	8.1.5 - Minor	<p>Telah dilakukan pemeriksaan kesehatan (MCU) berkala terhadap karyawan pada tahun 2022 sebanyak 63 orang dilengkapi dengan hasil pemeriksaan, pihak perusahaan harus memastikan bahwa semua karyawan sebanyak 196 orang dapat semua dilakukan pemeriksaan dengan mengatur jadwal MCU.</p> <p><i>There have been periodic health checks (MCU) for 63 employees in 2022 equipped with the results of the examination, the company must ensure that all 196 employees can all be examined by organizing an MCU schedule.</i></p>	<p>Telah dilaksanakan MCU oleh PT TTL yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari – 02 Februari 2024 dan telah terealisasi untuk 104 karyawan dari total 130 orang. Pemeriksaan meliputi Indeks Masa tubuh, gula darah sewaktu, asam urat pria dan Wanita. Selain pemeriksaan umum, juga dilakukan pemeriksaan audiometri untuk pekerja dengan resiko tinggi, pada tahun 2023 teralisasi sebanyak 26 orang sedangkan pada tahun 2024 terealisasi untuk pekerja sebanyak 35 orang. (CLOSED)</p> <p><i>MCU has been conducted by PT TTL which was held on January 29 - February 02, 2024 and has been realized for 104 employees out of a total of 130 people. Examinations include body mass index, blood sugar, uric acid in men and women.</i></p> <p><i>In addition to general examinations, audiometric examinations were also carried out for workers with high risks, in 2023 26 people were realized while in 2024 35 workers were realized. (CLOSED)</i></p>
21.	8.2.1 - Minor	<p>Unit Pengelola telah melakukan audit internal PHPL, namun belum melakukan audit internal yang berhubungan dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan efektifitas sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dilakukan setahun sekali</p> <p><i>The Management Unit has conducted internal PHPL audits, but has not conducted internal audits related to monitoring and evaluating the implementation and effectiveness of the Occupational Safety and Health (OHS) management system which is carried out once a year.</i></p>	<p>PT TTL telah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SMK3 yang dibuktikan dengan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan P2K3 pada tanggal 10 Januari 2024. Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk seluruh realisasi kegiatan P2K3 meliputi Triwulan I-IV tahun 2023. (CLOSED)</p> <p><i>PT TTL has carried out monitoring and evaluation of SMK3 implementation as evidenced by the P2K3 Activity Monitoring and Evaluation Report on January 10, 2024. Monitoring and Evaluation is carried out for the entire realization of P2K3 activities covering Quarter I-IV of 2023. (CLOSED)</i></p>
22.	4.1. - Obs	<p>PT TTL telah membuat Sustainability Report tahun 2021, perusahaan didorong untuk membuat Sustainability Report tahun 2022</p> <p><i>PT TTL has produced a Sustainability Report for 2021, the company is encouraged to produce a Sustainability Report for 2022.</i></p>	<p>PT TTL telah menyusun dokumen sustainability report tahun 2023, dimana dalam laporan tersebut telah menjelaskan rencana realisasi produksi, ekologi dan sosial untuk periode tahun 2022 dan 2023. (CLOSED)</p> <p><i>PT TTL has prepared a sustainability report document for 2023, in which the report has explained the production, ecological and social realization plans for the period of 2022 and 2023. (CLOSED)</i></p>

No	Klausul	Ketidaksesuaian	Hasil Verifikasi
23.	7.1.1 - Obs	Melakukan penanaman pada areal Kawasan Lindung lainnya yang penutupan lahannya terbuka atau tidak berhutan <i>Planting in other Protected Areas with open or non-forested land cover.</i>	PT TTL telah melakukan penanaman pada areal kawasan lindung KPPN yang dilaksanakan pada tahun 2023 sebanyak 50 batang dengan jenis Nyatoh dan Jambuan. (CLOSED) <i>PT TTL has planted 50 stems with Nyatoh and Jambuan species in the KPPN protected area in 2023. (CLOSED)</i>

(5) **Summary of Assessment Result / Resume Hasil Penilaian Kinerja PHL**

A. Stakeholder Consultation / Konsultasi Para Pihak

Inputs from Stakeholders Consultation / Masukan dari Konsultasi Para Pihak

Telah dilakukan konsultasi para pihak melalui email pada tanggal 29 April 2024 untuk menghimpun informasi terkait operasional pengelolaan hutan menggunakan form MUTU-4200N.FM kepada para pihak (sebanyak 23 para pihak), untuk kemudian dipertimbangkan dan dievaluasi dalam proses audit. Dalam form tersebut juga memungkinkan para pihak untuk mengkonfirmasi jika ingin bertemu dan berbicara secara langsung dengan auditor. Namun hingga audit selesai, tidak terdapat komentar yang masuk dari para pihak.

Konsultasi para pihak juga telah dilaksanakan saat audit berlangsung dengan melakukan pertemuan dengan perwakilan masyarakat yang terdampak yaitu Kampung Kanggup, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel. Hasil konsultasi menyatakan bahwa tidak terdapat komentar negatif terhadap Perusahaan. Pertemuan secara tatap muka dengan perwakilan masyarakat tidak dapat dilaksanakan pada kampung-kampung lainnya dikarenakan adanya eskalasi kerawanan keamanan di dalam dan sekitar konsesi.

Selain melalui mekanisme di atas, penyerapan informasi para pihak dan publik secara umum juga telah dilakukan dari sebelum dilakukan audit melalui telaah isu publik yang bersumber dari media masa untuk kemudian direview, divalidasi dan diverifikasi pada saat audit penilikan ke-1 ini.

Pada penilikan ke-1 ini, terdapat isu publik dari media masa elektronik berkaitan dengan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Tunas Timber Lestari dan PT Inocin Abadi (Korindo Group), sebagai berikut:

1. Media Masa Elektronik Suara Merauke, tanggal 05 Sep 2023, [https://suara.merauke.go.id/post/4234/perusahaan-inocin-abadi-merauke-phk-ratusan-karyawanPT Inocin Abadi/Korindo Grup Merauke, Papua Selatan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja \(PHK\) kepada 105 karyawan.](https://suara.merauke.go.id/post/4234/perusahaan-inocin-abadi-merauke-phk-ratusan-karyawanPT%20Inocin%20Abadi/Korindo%20Grup%20Merauke,%20Papua%20Selatan%20melakukan%20Pemutusan%20Hubungan%20Kerja%20(PHK)%20kepada%20105%20karyawan.)

Alasan perusahaan yang bergerak di Hutan Tanaman Industri (HTI) melakukan pemberhentian kepada ratusan karyawan karena kondisi keuangan perusahaan sedang dalam posisi tidak stabil, alias mengalami kerugian sehingga perusahaan tidak mampu lagi membayar gaji karyawan.

Para karyawan lantas mengadu ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merauke untuk melakukan mediasi, menyangkut hak-hak karyawan yang harus diberikan oleh perusahaan. Pengaduan telah dilakukan sejak dua pekan lalu dan sudah pada tahap mediasi.

"Dalam aturan, apabila terjadi PHK karena kondisi keuangan suatu perusahaan maka harus dilihat besaran pesangon yang akan diberikan kepada karyawan. Ini yang masih tarik ulur karna belum ada kesepakatan nilai pesangon antara perusahaan dan karyawan," terang Kadisnaker Trans Merauke, Cleopas Ndiken, Selasa (5/9/2023) di Merauke.

Kata Cleopas, jika dalam mediasi yang dilakukan Disnaker Trans Kabupaten belum menemukan titik terang, maka wakil karyawan disarankan mengajukan permohonan penyelesaian mediasi di tingkat provinsi. "Karena tahapan-tahapan itu harus dilalui," pungkas Kadisnaker Merauke.(Get)

A stakeholder consultation was conducted via email on April 29, 2024 to collect information related to forest management operations using the MUTU-4200N.FM form to the parties (as many as 23 parties), to then be considered and evaluated in the audit process. The form also allows the parties to confirm if they want to meet and speak directly with the auditor. However, until the audit was completed, no comments were received from the parties.

A stakeholder consultation was also conducted during the audit by meeting with representatives of the affected community in Kanggup Village, Jair District, Boven Digoel Regency. The results of the consultation stated that there were no negative comments on the Company. Face-to-face meetings with community representatives could not be held in other villages due to the escalation of security insecurity in and around the concession.

In addition to the mechanisms above, the absorption of information from the parties and the public in general has also been carried out before the audit was carried out through a review of public issues sourced from the mass media to then be reviewed, validated and verified during this 1st surveillance audit.

In this 1st surveillance, there was a public issue from the electronic mass media related to forest management carried out by PT Inocin Abadi (and PT Tunas Timber Lestari), as follows:

1. Suara Merauke Electronic Mass Media, September 5, 2023, <https://suara.merauke.go.id/post/4234/perusahaan-inocin-abadi-merauke-phk-ratusan-karyawan> PT Inocin Abadi/Korindo Group Merauke, South Papua terminated employment (PHK) to 105 employees.

The reason the company engaged in Industrial Plantation Forests (HTI) laid off hundreds of employees was because the company's financial condition was in an unstable position, aka experiencing losses so that the company was no longer able to pay employee salaries.

The employees then complained to the Merauke Regency Manpower and Transmigration Office to conduct mediation, regarding employee rights that must be provided by the company. The complaint has been made since two weeks ago and is at the mediation stage.

"In the regulation, if there is a layoff due to the financial condition of a company, the amount of severance pay that will be given to employees must be seen. This is still being debated because there has been no agreement on the severance pay value between the company and employees," explained the Head of the Merauke Trans Manpower Office, Cleopas Ndiken, Tuesday (5/9/2023) in Merauke. Cleopas said that if the mediation carried out by the Regency Trans Manpower Office has not found a bright spot, then employee representatives are advised to submit a request for mediation resolution at the provincial level. "Because those stages must be passed," concluded the Head of the Merauke Manpower Office. (Get)

Hasil Analisa dan Tindakanjuz Konsultasi Para Pihak

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap isu public dari media masa terkait adanya PHK di PT Tunas Timber Lestari, terkonfirmasi oleh wakil manajemen (MR) bahwa telah terjadi PHK yang disebabkan oleh kerugian yang dialami oleh Perusahaan berdasarkan hasil audit dari lembaga keuangan independent selama dua tahun berturut turut.

Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah disampaikan melalui:

- Surat nomor 05/Korindo-JKT/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 ditandatangani oleh Direktur Utama (Kim Young Cheol), ditujukan kepada Karyawan PT Inocin Abadi dan PT Tunas Timber Lestari. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Perusahaan mengalami kerugian usaha secara tajam dalam beberapa tahun terakhir dan harus mengambil kebijakan efisiensi melalui penyeimbangan biaya operasional dengan pendapatan usaha, dimana efisiensi tersebut berakibat pada pengurangan tenaga kerja di Perusahaan dan restrukturisasi karyawan menjadi karyawan kontrak (PKWT), disampaikan juga bahwa hal tersebut merupakan satu-satunya Solusi yang dapat diambil oleh Perusahaan. Perusahaan berkomitmen untuk membayarkan kompensasi meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak cuti.

Telah terjadi pertemuan antara Serikat Pekerja dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua Selatan tanggal 05 September 2023, pihak serikat pekerja yang mewakili pekerja dan pihak Perusahaan, telah melakukan perundingan Kembali dan menyepakati perhitungan besarnya pesangon sebesar 0,6 kali untuk masa kerja dibawah 15 tahun dan 1 kali pesangon untuk masa kerja diatas 15 tahun disertai dengan 1 kali uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak, serta pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi para pekerja yang beragama non Muslim. Ditunjukkan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial tingkat bipartite Kabupaten Merauke, ditandatangani oleh Serikat Pekerja.

Ditunjukkan surat permohonan pencabutan laporan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua Selatan tanggal 18 September 2023 dan ditandatangani oleh Serikat Pekerja.

Pemutusan Hubungan Kerja telah disepakati dibuktikan dengan surat Persetujuan Bersama tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh Direktur PT Tunas Timber Lestari dan PT Inocin Abadi, Direktur HRD, DGM HRD dan perwakilan pengurus Serikat Pekerja PUK SP KEP SPSI TSE Group Korindo Abadi. Surat persetujuan juga ditandatangani oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Papua Selatan yang diwakili oleh Kepala Seksi HI dan Pengawasan Ketenagakerjaan (Melyn Melani, SH) dan Plh Kepala Dinas – Kepala Bidang Transmigrasi (Alhari Rimbo, ST).

Berdasarkan data ketenagakerjaan PT Tunas Timber Lestari bulan Mei 2024, diketahui bahwa dari total realisasi PHK sejumlah 113 orang yang diputuskan dengan Surat Keputusan DGM HRD untuk masing-masing karyawan pada tanggal 09 Oktober 2023, kemudian sejumlah 55 orang diantaranya telah direkrut Kembali dengan status PKWT bertahap dari bulan Januari 2024.

Hasil wawancara dengan para pekerja yang juga termasuk anggota serikat pekerja terkonfirmasi bahwa mereka telah menerima hak-haknya sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan meliputi UP, UPMK dan UPH.

Berdasarkan uraian diatas, PT Tunas Timber Lestari telah melaksanakan semua proses Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan ketentuan dan telah melakukan pelibatan dengan pekerja secara memadai serta pemenuhan kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga PT Tunas Timber Lestari masih menunjukkan kesesuaian terhadap persyaratan standar Pengelolaan Hutan Lestari IFCC ST 1001:2021.

Based on the results of verification of public issues from the mass media regarding layoffs at PT Inocin Abadi (and PT Tunas Timber Lestari), it was confirmed by the management representative (MR) that there had been layoffs caused by losses experienced by the Company based on the audit results of an independent financial institution for two consecutive years.

Notification of Termination of Employment (PHK) has been submitted through:

- Letter number 05/Korindo-JKT/VII/2023 dated July 17, 2023 signed by the President Director (Kim Young Cheol), addressed to Employees of PT Inocin Abadi and PT Tunas Timber Lestari. The letter explained that the Company had experienced sharp business losses in the last few years and had to take an efficiency policy by balancing operational costs with business income, where this efficiency resulted in a reduction in the Company's workforce and the restructuring of employees into contract employees (PKWT), it was also conveyed that this was the only solution that could be taken by the Company. The Company is committed to paying compensation including severance pay, long service award money and leave entitlement replacement money.

A meeting was held between the Workers' Union and the South Papua Provincial Manpower Office on September 5, 2023, the workers' union representing the workers and the Company, has held negotiations again and agreed to calculate the amount of severance pay of 0.6 times for a work period of less than 15 years and 1 time severance pay for a work period of more than 15 years accompanied by 1 time service award money and replacement money for rights, as well as payment of holiday allowances (THR) for non-Muslim workers. Shown is the minutes of the settlement of industrial relations disputes at the bipartite level of Merauke Regency, signed by the Workers' Union.

Shown is a letter of request for the withdrawal of the Industrial Relations Dispute Settlement (PPHI) report addressed to the Head of the South Papua Provincial Manpower Office dated September 18, 2023 and signed by the Workers' Union.

The Termination of Employment has been agreed upon as evidenced by a Joint Agreement letter dated September 27, 2023 signed by the Directors of PT Tunas Timber Lestari and PT Inocin Abadi, Director of HRD, DGM HRD and representatives of the management of the PUK SP KEP SPSI TSE Group Korindo Abadi Workers' Union. The letter of approval was also signed by the Manpower, Transmigration, Energy and Mineral Resources Office of South Papua Province represented by the Head of the HI and Manpower Supervision Section (Melyn Melani, SH) and the Acting Head of the Office - Head of the Transmigration Division (Alhari Rimbo, ST).

Based on PT Tunas Timber Lestari's employment data for May 2024, it is known that from the total realization of layoffs of 113 people who were decided by the DGM HRD Decree for each employee on October 9, 2023, then 55 of them have been re-recruited with a PKWT status gradually from January 2024.

The results of interviews with workers who are also members of the trade union confirmed that they have received their rights in accordance with the provisions and agreements covering UP, UPMK and UPH.

Based on the description above, PT Tunas Timber Lestari has carried out all Termination of Employment processes in accordance with the provisions and has carried out adequate involvement with workers and fulfilled obligations in accordance with applicable provisions, so that PT Tunas Timber Lestari still shows compliance with the requirements of the IFCCC ST 1001:2021 Sustainable Forest Management standard.

B. Audit Results / Hasil Penilaian Kinerja

No	Klausul	Kesimpulan
1	4. Kepemimpinan 4. Leadership	<ul style="list-style-type: none"> • Unit Pengelola telah memiliki dokumen visi dan misi perusahaan yang telah ditandatangani oleh Direktur Produksi pada tanggal 26 Januari 2021. Selain telah mempunyai Visi Misi dan Tujuan perusahaan, PT TTL juga telah mempunyai dokumen Komitmen Pengelolaan Hutan Produksi yang ditandatangani oleh Direktur PT TTL pada tanggal 23 Desember 2022. Legal dokumen Visi, Misi dan Komitmen tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan, masyarakat dan mitra kerja, serta publik dapat mengetahui komitmen perusahaan dengan mengakses website PT TTL: https://timberlestari.com. • Unit Pengelola telah memiliki Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan Terintegrasi PT TTL yang diterbitkan pada 01 Januari 2023, ditandatangani oleh Direktur Produksi (Vineba Chandra). Selanjutnya pada tahun 2024 struktur organisasi PT TTL diperbaharui berdasarkan Keputusan Direktur Produksi PBPH PT TTL (Vinoba Chandra) No. SK.02/KEP/TTL/JKT/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 dan dokumen deskripsi jabatan terintegrasi No Dokumen: 001/JOBDES/ TTL/I/2024 tanggal terbit 05 Januari 2024, yang telah menjelaskan fungsi jabatan dan posisi jabatan dalam struktur organisasi dari mulai Komisaris, Direktur Utama, SPI, Direktur produksi, SMK3, Manajer Camp, Kepala Bagian dan Kepala Seksi <p>- The Management Unit has a company vision and mission document which was signed by the Production Director on January 26, 2021. In addition to having a company Vision, Mission and Objectives, PT TTL also has a Production Forest Management Commitment document signed by the Director of PT TTL on December 23, 2022. The legal Vision, Mission and Commitment documents have been socialized to employees, communities and partners, and the public can</p>

No	Klausul	Kesimpulan
		<p><i>find out the company's commitment by accessing the PT TTL website: https://timberlestari.com.</i></p> <p><i>- The Management Unit already has PT TTL Integrated Organizational Structure and Position Description issued on 01 January 2023, signed by the Production Director (Vineba Chandra). Furthermore, in 2024 the organizational structure of PT TTL was updated based on the Decree of the PBPH Production Director of PT TTL (VinoBa Chandra) No. SK.02/KEP/TTL/JKT/III/2024 dated 19 March 2024 and the integrated position description document No. Document: 001/JOBDES/TTL/1/2024 published date 05 January 2024, which has explained the functions of positions and positions in the organizational structure starting from the Commissioner, President Director, SPI, Production Director, SMK3, Camp Manager, Section Head and Section Head.</i></p>
2	5. Perencanaan 5. Planning	<ul style="list-style-type: none"> • PT TTL telah membuat dokumen Manajemen Resiko dan Peluang Pengelolaan Hutan, dengan komponen penting berupa Identifikasi Peluang dan Resiko, Penilaian Peluang dan Resiko, Pengembangan Strategi Pengelolaan, Perencanaan Keuangan, Pelaporan dan Keterbukaan dan Pemantauan dan Evaluasi. Serta Resiko pengelolaan hutan akan dipengaruhi oleh Faktor Kebijakan Pemerintah dan Perusahaan, Faktor Sosial Ekonomi dan Faktor Lingkungan. • PT TTL telah memiliki sistem inventarisasi dan pemetaan yang komprehensif dan berkala terhadap sumberdaya hutan kayu. Laporan IHMB telah dievaluasi oleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XV Jayapura sesuai surat Kepala BPHP Wilayah XV Nomor: S.174/BPHP.XV/PEPHP/5/2019 tanggal 27 Mei 2019. • Dalam kaitannya dengan inventarisasi dan pemetaan terhadap sumberdaya hutan yang meliputi kawasan hutan yang penting secara ekologis, dan memiliki fungsi sosial dan budaya, PT Tunas Timber Lestari telah melakukan penilaian Nilai Konservasi Tinggi yang dilaksanakan pada bulan Februari -April 2021 • PT TTL telah memiliki dokumen RKUPH Periode 2021-2030 sesuai dengan Surat Keputusan MenLHK Nomor: SK.377/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2021 tanggal 26 Januari 2021, yang telah memuat terkait Kelola Produksi sesuai Rencana Tata Ruang dan Rencana Penataan Areal Kerja • Untuk memelihara, melestarikan atau meningkatkan keanekaragaman hayati pada tingkat lanskap, ekosistem, spesies, dan genetik, PT Tunas Timber Lestari dalam dokumen perencanaan jangka panjang (RKUPH) Periode Tahun 2021-2030 telah mengalokasikan beberapa kawasan lindung, seluas 73.195 Ha atau sebesar 34,05% dari total luas areal konsesi. • Berdasarkan dokumen RKUPH periode 2021-2030 dan dokumen RKTPH 2023 dan 2024 yang telah diterbitkan, PT TTL tidak merencanakan pengelolaan pemanfaatan produk hasil hutan bukan kayu secara komersil. Unit Pengelola telah melaksanakan inventarisasi terhadap sumber daya hutan yang termasuk ke dalam kategori Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai kebutuhan dasar melalui studi Social Impact Assessment (SIA) tahun 2020, Studi Nilai Konservasi Tinggi (NKT) tahun 2021 yang di dalamnya mengidentifikasi HHBK. Selain itu juga PT TTL telah melakukan inventarisasi Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu tahun 2021. Pemanfaatan HHBK oleh masyarakat terbatas untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan bukan untuk tujuan komersil. • Untuk meminimalkan risiko degradasi dan kerusakan ekosistem hutan, dalam operasional kegiatan pengelolaan hutan, PT Tunas Timber Lestari telah menyusun prosedur mitigasi dampak lingkungan untuk seluruh kegiatan operasional. • PT Tunas Timber Lestari telah berupaya mematuhi peraturan perundangan yang berlaku baik lokal, nasional maupun peraturan internasional yang sudah diratifikasi terkait dengan perlindungan alam dan lingkungan, spesies yang terancam punah dan dilindungi • PT Tunas Timber Lestari telah memiliki mekanisme atau prosedur yang diterapkan untuk melindungi hutan dari penebangan ilegal; pemukiman ilegal; perburuan ilegal; perambahan yang tercantum dalam Prosedur Pengamanan dan Perlindungan Hutan, SOP Nomor: 18/SOP-TTL/2011 Revisi 3 tanggal 14 Juli 2023. SOP tersebut sebagai pedoman tata cara pelaksanaan pengamanan dan perlindungan hutan dari kegiatan perambahan, illegal logging (pencurian/penebangan liar) dan perburuan satwa. • PT Tunas Timber Lestari telah melakukan identifikasi penguasaan lahan yang merupakan hak ulayat untuk setiap rencana kerja tahunan, dibuktikan dengan data hasil identifikasi hak ulayat dilengkapi dengan peta

No	Klausul	Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> • Unit Pengelola telah melakukan identifikasi terhadap kepemilikan hak tradisional melalui identifikasi marga pemilik ulayat dibuktikan dengan adanya peta marga blok RKTPH 2023 sistem TPTI. Selain itu PT TTL telah memiliki mekanisme kompensasi penebangan pada tanah ulayat milik masyarakat yaitu SOP Pembayaran Kompensasi Hak Ulayat Masyarakat nomor 47/SOP-TTL/2017 revisi 3 tanggal 01 Desember 2022. Kesepakatan dan pemenuhan kewajiban pembayaran kompensasi dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran Kompensasi Penebangan Atas Hak Ulayat yang kemudian ditandatangani oleh pihak PT TTL, pemilik ulayat, dan saksi-saksi seperti Kepala Kampung dan pihak TRIPIKA. Unit Pengelola telah menunjukkan bukti-bukti pembayaran fee produksi kepada masyarakat adat sesuai ketentuan dan kesepakatan. • Tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dan konvensi fundamental ILO yang terjadi di PT Tunas Timber Lestari selama kurun waktu satu tahun terakhir • PT TTL memiliki sistem untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas risiko kesehatan dan kecelakaan kerja, serta organisasi harus menginformasikan hal tersebut kepada pekerja untuk melindungi dan mencegah pekerja dari risiko pekerjaannya • Hasil verifikasi, tidak ditemukan indikasi pelanggaran terhadap perjanjian kerja bersama yang berlaku mengenai jam kerja dan cuti, pengupahan, kesempatan yang sama, non diskriminasi, bebas dari pelecehan di tempat kerja, serta kesetaraan gender. <p>- PT TTL has developed a Forest Management Risks and Opportunities Management document, with important components such as Identification of Opportunities and Risks, Assessment of Opportunities and Risks, Development of Management Strategies, Financial Planning, Reporting and Disclosure and Monitoring and Evaluation. Forest management risks will be influenced by government and company policy factors, socio-economic factors and environmental factors.</p> <p>- PT TTL has a comprehensive and periodic inventory and mapping system of timber forest resources. The IHMB report has been evaluated by the Jayapura Region XV Production Forest Management Center in accordance with the letter of the Head of BPHP Region XV Number: S.174/BPHP.XV/PEPHP/5/2019 dated May 27, 2019.</p> <p>- In relation to the inventory and mapping of forest resources which include ecologically important forest areas, and have social and cultural functions, PT Tunas Timber Lestari has conducted a High Conservation Value assessment which was carried out in February-April 2021.</p> <p>- PT TTL already has an RKUPH document for the 2021-2030 period in accordance with the Decree of the Minister of Environment and Forestry Number: SK.377/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2021 dated January 26, 2021, which contains related Production Management according to the Spatial Plan and Work Area Arrangement Plan.</p> <p>- To maintain, conserve or increase biodiversity at the landscape, ecosystem, species and genetic levels, PT Tunas Timber Lestari in the long-term planning document (RKUPH) for the 2021-2030 period has allocated several protected areas, covering an area of 73,195 Ha or 34.05% of the total concession area.</p> <p>- Based on the RKUPH document for the 2021-2030 period and the published 2023 and 2024 RKTPH documents, PT TTL does not plan to manage the commercial utilization of non-timber forest products. The Management Unit has conducted an inventory of forest resources included in the category of Non-Timber Forest Products (NTFPs) which are utilized by the community as basic needs through the Social Impact Assessment (SIA) study in 2020, High Conservation Value (HCV) Study in 2021 which identified NTFPs. In addition, PT TTL has also conducted an inventory of Non-Timber Forest Product Utilization in 2021. Utilization of NTFPs by the community is limited to meeting daily needs and not for commercial purposes.</p> <p>- To minimize the risk of degradation and damage to forest ecosystems, in the operation of forest management activities, PT Tunas Timber Lestari has developed environmental impact mitigation procedures for all operational activities.</p> <p>- PT Tunas Timber Lestari has endeavored to comply with applicable local, national and ratified international laws and regulations related to the protection of nature and the environment, endangered and protected species.</p> <p>- PT Tunas Timber Lestari has a mechanism or procedure in place to protect the forest from illegal logging; illegal settlement; illegal hunting; encroachment which is stated in the Forest Security and Protection Procedure, SOP Number: 18/SOP-TTL/2011 Revision 3 dated July 14, 2023. The SOP is a guideline for the implementation of forest security and protection procedures from encroachment, illegal logging (theft/illegal logging) and animal poaching.</p>

No	Klausul	Kesimpulan
		<p>- PT Tunas Timber Lestari has identified land tenure that is customary rights for each annual work plan, evidenced by data from the identification of customary rights equipped with maps.</p> <p>- The Management Unit has identified the ownership of traditional rights through the identification of clans of customary owners as evidenced by the existence of a clan map of the RKTPH 2023 block of the TPTI system. In addition, PT TTL has a compensation mechanism for logging on community-owned customary land, namely the SOP for Payment of Compensation for Community Customary Rights number 47/SOP-TTL/2017 revision 3 dated December 01, 2022. The agreement and fulfillment of compensation payment obligations are outlined in the Minutes of Payment of Logging Compensation for Customary Rights which is then signed by PT TTL, the customary owner, and witnesses such as the Village Head and TRIPIKA. The Management Unit has shown evidence of payment of production fees to indigenous peoples in accordance with the provisions and agreements.</p> <p>- There are no indications of violations of human rights and ILO fundamental conventions that occurred at PT Tunas Timber Lestari during the past year.</p> <p>- PT TTL has a system to identify and take action on occupational health and accident risks, and the organization must inform workers to protect and prevent workers from occupational risks.</p> <p>- As a result of verification, there were no indications of violations of applicable collective labor agreements regarding working hours and leave, wages, equal opportunity, non-discrimination, freedom from harassment in the workplace, and gender equality.</p>
3	6. Penunjang 6. Supporting	<ul style="list-style-type: none"> • PT TTL telah memiliki pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan lestari sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dari Kantor Akuntan ISPIADY & DANDE (NIUKAP No. 1261/KM.1/2017) No. 00045/2.1172/AU.2/01/1483.3/1/IV/2024 tanggal 28 April 2024 • Unit Pengelola telah memiliki Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan Terintegrasi PT TTL yang diterbitkan pada 01 Januari 2023, ditandatangani oleh Direktur Produksi (Vineba Chandra). Selanjutnya pada tahun 2024 struktur organisasi PT TTL diperbaharui berdasarkan Keputusan Direktur Produksi PBPH PT TTL (Vineba Chandra) No. SK.02/KEP/TTL/JKT/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 dan dokumen deskripsi jabatan terintegrasi No Dokumen: 001/JOBDES/ TTL/I/2024 tanggal terbit 05 Januari 2024, yang telah menjelaskan fungsi jabatan dan posisi jabatan dalam struktur organisasi dari mulai Komisararis, Direktur Utama, SPI, Direktur produksi, SMK3, Manajer Camp, Kepala Bagian dan Kepala Seksi • Unit Pengelola telah memiliki SOP komunikasi dengan nomor: 44/SOP-TTL/2017 tentang sosialisasi dan penyuluhan dan telah ditandatangani oleh pihak manajemen pada tanggal 01 Desember 2022. Di dalam prosedur tersebut dijelaskan mengenai prosedur kerja meliputi: persiapan berupa surat pemberitahuan kepada stake holder, pelaksanaan berupa pertemuan dan sosialisasi. • Berdasarkan wawancara dengan bagian Humas dan masyarakat perwakilan kampung Kanggup, diketahui PT TTL telah membangun komunikasi yang efektif dan berkelanjutan terkait hak-hak masyarakat adat (hak ulayat). Kesepakatan dengan masyarakat adat telah dibuat oleh PT TTL dalam pengelolaan areal hutan sesuai dengan hak masyarakat setempat, yang dibuat secara partisipatif dan adil dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan termasuk distribusi insentif, biaya dan manfaat secara adil. • PT TTL telah menyusun Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik per semester yang dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua, diantaranya yaitu Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik semester I dan II tahun 2023. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa tingkat kerawanan konflik yang ada berada pada status "terkendali". Selain itu, PT TTL telah melakukan pencatatan keluhan secara rutin dibuktikan dengan Buku Catatan Keluhan periode 2023 • Unit Pengelola telah menerbitkan surat kebijakan masa simpan dokumen yang telah ditandatangani oleh direktur produksi (Vinoba Candra) pada tanggal 23 Desember 2019 yang menyatakan "Agar kegiatan dalam ijin usaha pengelolaan hasil hutan kayu terdokumentasi dengan baik dan berkesinambungan pada PT TTL, maka perusahaan membuat kebijakan untuk mewajibkan menyimpan setiap dokumen, data dan informasi mengenai keadaan dan semua hal yang menyangkut perusahaan selama jangka waktu 5 (lima) tahun".

No	Klausul	Kesimpulan
		<p>- PT TTL has had funding for sustainable forest management activities as stated in the Independent Auditor's Report on Financial Statements for the Year Ended December 31, 2023 from ISPIADY & DANDE Accounting Firm (NIUKAP No. 1261/KM.1/2017) No. 00045/2.1172/AU.2/01/1483.3/1/IV/2024 dated April 28, 2024.</p> <p>- The Management Unit has an Integrated Organizational Structure and Position Description of PT TTL issued on January 01, 2023, signed by the Production Director (Vineba Chandra). Furthermore, in 2024 the organizational structure of PT TTL was updated based on the Decree of the PBPH Production Director of PT TTL (Vineba Chandra) No. SK.02/KEP/TTL/JKT/III/2024 dated 19 March 2024 and the integrated position description document No. Document: 001/JOBDES/ TTL/I/2024 dated January 05, 2024, which has explained the functions of positions and positions in the organizational structure starting from the Commissioner, President Director, SPI, Production Director, SMK3, Camp Manager, Section Head and Section Head.</p> <p>- The Management Unit has a communication SOP with number: 44/SOP-TTL/2017 concerning socialization and counseling and has been signed by the management on December 01, 2022. The procedure describes work procedures including: preparation in the form of notification letters to stakeholders, implementation in the form of meetings and socialization.</p> <p>- Based on interviews with the Public Relations department and community representatives of Kanggup village, it is known that PT TTL has built effective and sustainable communication regarding the rights of indigenous peoples (hak ulayat). Agreements with indigenous communities have been made by PT TTL in managing forest areas in accordance with local community rights, which are made in a participatory and fair manner by considering the rights and obligations of stakeholders including fair distribution of incentives, costs and benefits.</p> <p>- PT TTL has prepared Potential Mapping and Conflict Resolution Reports per semester reported to the Papua Provincial Forestry Service, including the first and second semester Conflict Mapping and Resolution Reports of 2023. The report states that the level of conflict vulnerability is "under control". In addition, PT TTL has routinely recorded grievances as evidenced by the Grievance Log Book for the period 2023.</p> <p>- The Management Unit has issued a document retention policy letter signed by the production director (Vinoba Candra) on December 23, 2019 which states "In order for the activities in the timber forest product management business license to be well documented and sustainable at PT TTL, the company makes a policy to require the retention of every document, data and information regarding the situation and all matters concerning the company for a period of 5 (five) years".</p>
4	7. Operasional 7. Operational	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat Upaya yang bertujuan untuk meningkatkan hutan terkait Sosial Budaya Sumber Daya Hutan, berupa Identifikasi keberadaan areal yang memiliki nilai budaya Masyarakat adat dan atau Masyarakat tradisional melalui studi Nilai Konservasi Tinggi dan Sosial Impact Assessment tahun 2020, serta identifikasi dan Pemetaan keberadaan areal yang menjadi sumber daya penghidupan masyarakat (HHBK), yang tercantum dalam Laporan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu oleh Masyarakat Adat Kampung Binaan di Areal IUPHHK-HA PT Tunas Timber Lestari Tahun 2021. • Dalam kegiatan operasional perusahaan hutan, PT Tunas Timber Lestari menerapkan sistem silvikultur TPTI dimana pohon-pohon yang ditebang yaitu hanya pohon yang mempunyai diameter 40 cm ke atas (HP) dan 50 cm ke atas (HPT), sehingga hal ini akan menjamin keberlangsungan atau kelestarian perusahaan hutan karena pohon-pohon yang tidak masuk kriteria diameter tetap dibiarkan tidak ditebang untuk daur berikutnya • Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, PT Tunas Timber Lestari telah melaksanakan aksi mitigasi emisi GRK berupa implementasi penebangan ramah lingkungan (RIL), penanaman pengayaan/rehabilitasi, penanaman kanan kiri jalan, penanaman TPTJ (Silin) dan penanaman rehabilitasi di areal KPPN. Pengamatan kegiatan penanaman rehabilitasi dilakukan pada Blok RKT 2022 petak AP 47 pada koordinat 060 19'48,4" LS dan 1400 49' 55,3" BT dengan jenis spesies lokal Nyatoh dan Jambuan dengan kondisi pertumbuhan cukup baik. • PT TTL tidak melakukan konversi hutan diluar Penataan Ruang yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, konversi dilakukan hanya untuk tujuan PWH sesuai dengan perundangan untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami. Selain itu juga PT TTL tidak melakukan kegiatan Aforestasi dan konversi hutan yang sangat terdegradasi. • PT Tunas Timber Lestari telah mempunyai kebijakan yang melarang menggunakan api untuk praktik pengelolaan hutan kecuali untuk daerah dimana api merupakan alat penting untuk perlindungan satwa liar dan pengelolaan habitat, yaitu termuat dalam dokumen

No	Klausul	Kesimpulan
		<p>Komitmen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari PT Tunas Timber Lestari yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 23 Desember 2023. Hasil verifikasi tidak ditemukan adanya praktek penggunaan api untuk pengelolaan hutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam antisipasi penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, PT Tunas Timber Lestari telah memiliki SDM pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Regu inti BRIGDALKARHUTLA seluruhnya telah mengikuti pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dari Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Maluku dan Papua pada tanggal 28-29 September 2023 • PT TTL melakukan penanaman pengayaan/rehabilitasi areal-areal bekas tebangan yang terbuka pada Blok RKT seperti bekas jalan sarad, bekas TPn/TPK, dan kanan kiri jalan angkutan dengan jenis-jenis tanaman asli setempat, seperti Nyatoh, Jambuan, Bintangur. Sedangkan Pada Blok dengan system silvikultur TPTJ dilakukan penanaman pada jalur tanaman dengan jenis Nyatoh dan Shorea leprosula. Dimana penggunaan spesies tersebut berdasar pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Tim Pakar Silvikultur Intensif dari Universitas Palangka Raya, Kementerian Kehutanan dan PT Tunas Timber Lestari pada tahun 2009-2014 yang telah dipublikasikan dalam Prosiding Seminar Nasional Silvikultur II tanggal 28 Agustus 2014, yang diterbitkan oleh Universitas Gajah Mada. • PT TTL telah menerbitkan SOP Reduced Impact Logging Dokumen No. 37/SOP-TTL/2011 Revisi 3 tanggal 01 Desember 2022 dan telah membuat Laporan Reduced Impact Logging (RIL) tahun 2023. SOP yang diterbitkan telah sesuai dengan pedoman RIL (Lampiran IX PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021) meliputi perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan dan paska pemanenan yang telah diimplementasikan secara memadai. • PT Tunas Timber Lestari telah mempunyai prosedur terdokumentasi Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, SOP Nomor: 62/SOP-TTL/2022 Revisi 02 tanggal 05 Desember 2023. PT Tunas Timber Lestari telah memiliki kerjasama pengangkutan Limbah B3 dengan PT Afreen Animha Lestari sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3 Nomor: 15/PTAAL/MOU/PTTTL-01/04/2024 tanggal 1 April 2023 dan Nomor: 32/PTAAL/MOU/PTTTL-01/04/2024 tanggal 1 April 2023. • Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan di persemaian TPTI dan Persemaian TPTJ (Silin) serta lokasi penanaman rehabilitasi/pengayaan maupun penanaman TPTJ (Silin), diketahui bahwa PT Tunas Timber Lestari tidak menggunakan pestisida, fungisida, maupun herbisida, baik di persemaian maupun pada operasional penanaman di lapangan. • PT TTL telah menerbitkan Rencana Kerja Tahunan secara self approval, meliputi RKTPH 2023: Keputusan Direktur Nomor: 01/Kep/TTL-JKT/I/2023 tanggal 16 Februari 2023, dengan target produksi TPTI sebesar 64.076,19 ³ dan target pemanfaatan limbah pembalakan sebesar 9.611,44 m³ dan target Produksi TPTJ sebesar 29.805,15 m³; Produksi Jalur Tanam sebesar 17.776,47 m³; Produksi PWH sebesar 1.320,19 m³ dan target pemanfaatan limbah pembalakan sebesar 7.335,32 m³. RKTPH 2024: Keputusan Direktur Nomor: 01/Kep/TTL-JKT/I/2024 tanggal 22 Januari 2024, dengan target produksi TPTI sebesar 41.820,08 ³; Produksi CO 2023 sebesar 10.069,43 m³ dan target pemanfaatan limbah pembalakan sebesar 9.156,97 m³ dan target Produksi TPTJ sebesar 21.100,37 m³; Produksi Jalur Tanam sebesar 20.885,23 m³; Produksi PWH sebesar 1.553,16 m³ dan target pemanfaatan limbah pembalakan sebesar 3.723,60 m³ • PT TTL telah menerbitkan SOP Lacak Balak Nomor: SOP 63/SOP PRC-TTL/2023, tanggal 02 Januari 2023 yang telah diimplementasikan secara memadai. • PT TTL telah melakukan pengelolaan dan pemantauan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi pada tahun 2023 sesuai dengan yang direkomendasikan pada saat penyusunan dokumen kajian Nilai Konservasi Tinggi • PT TTL tidak melakukan eksploitasi terhadap spesies tumbuhan dan satwa yang dilindungi, terancam dan dalam bahaya kepunahan untuk tujuan komersial • Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan di lokasi penanaman maupun di persemaian tidak ditemukan adanya penggunaan pohon hasil modifikasi genetik. Seluruh bibit yang ada di persemaian seluruhnya merupakan bibit cabutan alami yang berasal dari areal konsesi PT Tunas Timber Lestari berasal dari Kebun Benih yang berada pada Petak AZ 52 maupun dari tempat lainnya di dalam areal konsesi. Sedangkan jenis Shorea untuk tanaman pada sistem silvikultur TPTJ berasal dari stek pucuk dari kebun pangkas yang ada di persemaian SILIN dan dari pohon Shorea leprosula yang telah berbuah. • PT TTL telah merealisasikan kegiatan penanaman kanan kiri jalan untuk tahun kegiatan 2023 sepanjang 15 km (40 ha) dengan jumlah bibit yang ditanam sebanyak 19.200 bibit sedangkan untuk kegiatan Pengayaan/Rehabilitasi pada blok RKT 202 telah terealisasi

No	Klausul	Kesimpulan
		<p>seluas 48,51 ha dengan bibit yang telah ditanam sebanyak 53.895 btg. Hasil pemeriksaan lapangan pada koordinat 06°24' 32,14" S dan 140°44' 18,21" E telah dilaksanakan kegiatan penanaman dengan kondisi tanaman tumbuh dengan baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Tunas Timber Lestari dalam melakukan operasional penebangan dilakukan dengan implementasi Teknik RIL hal ini dilakukan untuk melindungi tanah dan kawasan yang sensitif dan rawan erosi serta di kawasan dimana kegiatan pengelolaan dapat menyebabkan erosi tanah yang berlebihan ke dalam aliran sungai. Tindakan yang dilakukan diantaranya: pembuatan rencana blok tebangan, pembuatan jalur tebangan, pembuatan rencana jalan sarad, pembuatan rencana TPn, penandaan areal kritis, penandaan batas areal konservasi, pembuatan drainase di jalan angkutan, pembuatan jebakan sedimen, dll. • PT TTL telah merencanakan program jangka panjang kelola sosial atau (CSC) yang telah dituangkan dalam dokumen RKUPH PT TTL periode 2021-2030. Berdasarkan observasi di lapangan di Kampung Kanggup diketahui terdapat fasilitas publik yang sebagian dibantu oleh perusahaan untuk mendorong terciptanya kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat, diantaranya : Balai Pengobatan, Gereja, Rumah tinggal penduduk dan Sekolah SD. • Dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan diimplementasikan dalam bentuk rekrutmen tenaga kerja lokal, yang saat ini telah terealisasi sebanyak 35 orang berdasarkan data tenaga kerja bulan April 2024 yang dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan. <p><i>- There are efforts aimed at improving forests related to the Socio-Culture of Forest Resources, in the form of Identifying the existence of areas that have cultural values of indigenous peoples and / or traditional communities through High Conservation Value studies and Social Impact Assessment in 2020, as well as identifying and Mapping the existence of areas that are a source of community livelihood resources (NTFPs), which are listed in the Report on Utilization of Non-Timber Forest Products by Indigenous Peoples of Assisted Villages in the IUPHHK-HA Area of PT Tunas Timber Lestari in 2021.</i></p> <p><i>- In the operational activities of forest exploitation, PT Tunas Timber Lestari applies the TPTI silviculture system where the trees cut down are only trees with a diameter of 40 cm and above (HP) and 50 cm and above (HPT), so this will ensure the sustainability or sustainability of forest exploitation because trees that do not enter the diameter criteria are still left uncut for the next cycle.</i></p> <p><i>- Based on the results of field verification, PT Tunas Timber Lestari has carried out GHG emission mitigation actions in the form of implementing environmentally friendly logging (RIL), enrichment/rehabilitation planting, planting right and left of the road, planting TPTJ (Silin) and rehabilitation planting in the KPPN area. Observations of rehabilitation planting activities were carried out in RKT Block 2022 plot AP 47 at coordinates 060 19' 48.4" LS and 1400 49' 55.3" East with local species of Nyatoh and Jambuan with good growth conditions.</i></p> <p><i>- PT TTL does not carry out forest conversion outside the Spatial Planning that has been approved by the Ministry of Environment and Forestry, the conversion is carried out only for PWH purposes in accordance with the legislation for business activities to utilize natural growth timber forest products. In addition, PT TTL does not carry out afforestation and conversion of highly degraded forests.</i></p> <p><i>- PT Tunas Timber Lestari has a policy that prohibits the use of fire for forest management practices except for areas where fire is an important tool for wildlife protection and habitat management, which is contained in the PT Tunas Timber Lestari Sustainable Production Forest Management Commitment document signed by the Director on December 23, 2023. The verification results found no practice of using fire for forest management.</i></p> <p><i>- In anticipation of forest and land fire prevention and control, PT Tunas Timber Lestari has human resources for forest and land fire control. The core team of BRIGDALKARHUTLA have all attended training on forest and land fire control from the Maluku and Papua Regional Climate Change Control Center on September 28-29, 2023.</i></p> <p><i>- PT TTL conducts enrichment/rehabilitation planting of open logged areas in RKT Blocks such as former sarad roads, former TPn/TPK, and right and left of transportation roads with local native plant species, such as Nyatoh, Jambuan, Bintangur. Whereas in blocks with the TPTI silviculture system, planting is carried out on plant paths with Nyatoh and Shorea leprosula species. Where the use of these species is based on the results of research conducted by the Intensive Silviculture Expert Team from Palangka Raya University, the Ministry of Forestry and</i></p>

No	Klausul	Kesimpulan
		<p><i>PT Tunas Timber Lestari in 2009-2014 which has been published in the Proceedings of the Silviculture II National Seminar on August 28, 2014, published by Gajah Mada University.</i></p> <p><i>- PT TTL has issued SOP Reduced Impact Logging Document No. 37/SOP-TTL/2011 Revision 3 dated December 01, 2022 and has made a Reduced Impact Logging (RIL) Report in 2023. The SOP issued is in accordance with the RIL guidelines (Appendix IX PermenLHK No. 8 of 2021) covering harvesting planning, harvesting implementation and post-harvesting which has been adequately implemented.</i></p> <p><i>- PT Tunas Timber Lestari has a documented procedure for the Management of Hazardous and Toxic Materials (B3) and Hazardous and Toxic Waste, SOP Number: 62/SOP-TTL/2022 Revision 02 dated December 05, 2023. PT Tunas Timber Lestari has a B3 Waste transportation cooperation with PT Afreen Animha Lestari in accordance with the B3 Waste Transportation and Management Cooperation Agreement Letter Number: 15/PTAAL/MOU/PTTTL-01/04/2024 dated April 1, 2023 and Number: 32/PTAAL/MOU/PTTTL-01/04/2024 dated April 1, 2023.</i></p> <p><i>- Based on the results of document verification and field observations at the TPTI nursery and TPTJ (Silin) nursery as well as rehabilitation/enrichment planting sites and TPTJ (Silin) planting, it is known that PT Tunas Timber Lestari does not use pesticides, fungicides, or herbicides, both in the nursery and in field planting operations.</i></p> <p><i>- PT TTL has issued Annual Work Plans by self approval, including RKTTPH 2023: Director Decree Number: 01/Kep/TTL-JKT/I/2023 dated February 16, 2023, with a TPTI production target of 64,076.19 m³ and logging waste utilization target of 9,611.44 m³ and TPTJ Production target of 29,805.15 m³; Planting Line Production of 17,776.47 m³; PWH Production of 1,320.19 m³ and logging waste utilization target of 7,335.32 m³. RKTTPH 2024: Director Decision Number: 01/Kep/TTL-JKT/I/2024 dated January 22, 2024, with TPTI production target of 41,820.08 m³; 2023 CO production of 10,069.43 m³ and logging waste utilization target of 9,156.97 m³ and TPTJ Production target of 21,100.37 m³; Planting Line production of 20,885.23 m³; PWH production of 1,553.16 m³ and logging waste utilization target of 3,723.60 m³.</i></p> <p><i>- PT TTL has issued a Chain of Custody SOP Number: SOP 63/SOP PRC-TTL/2023, dated January 02, 2023 which has been adequately implemented.</i></p> <p><i>- PT TTL has conducted management and monitoring of the High Conservation Value Area in 2023 as recommended during the preparation of the High Conservation Value assessment document.</i></p> <p><i>- PT TTL does not exploit protected, threatened and endangered plant and animal species for commercial purposes.</i></p> <p><i>- Based on the results of document verification and field observations at the planting site and in the nursery, there is no use of genetically modified trees. All seedlings in the nursery are all naturally pulled seedlings originating from the PT Tunas Timber Lestari concession area from the Seed Garden located in Plot AZ 52 and from other places within the concession area. While the Shorea species for plants in the TPTJ silviculture system come from shoot cuttings from the pruning garden in the SILIN nursery and from fruiting Shorea leprosula trees.</i></p> <p><i>- PT TTL has realized planting activities on the right and left of the road for the 2023 activity year along 15 km (40 ha) with the number of seedlings planted as many as 19,200 seedlings while for Enrichment/Rehabilitation activities in RKT202 block, 48.51 ha has been realized with 53,895 btg of seedlings planted. Field inspection results at coordinates 06°24'32.14" S and 140°44'18.21" E, planting activities have been carried out with the condition of the plants growing well.</i></p> <p><i>- PT Tunas Timber Lestari in conducting logging operations is carried out with the implementation of the RIL Technique this is done to protect sensitive and erosion-prone soils and areas and in areas where management activities can cause excessive soil erosion into the river flow. Actions taken include: making logging block plans, making logging lanes, making sarad road plans, making TPn plans, marking critical areas, marking conservation area boundaries, making drainage on transportation roads, making sediment traps, etc.</i></p> <p><i>- PT TTL has planned a long-term social management program or (CSC) which has been outlined in the PT TTL RKUPH document for the 2021-2030 period. Based on field observations in Kanggup Village, it is known that there are public facilities that are partly assisted by the company to encourage the creation of long-term health and welfare for the community, including: Medical Center, Church, residential houses and elementary school.</i></p> <p><i>- In order to provide opportunities for the community to obtain employment, it is implemented in the form of recruitment of local workers, which has currently been realized as many as 35 people based on labor data in April 2024 reported to the Manpower Office.</i></p>
5	8. Evaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • PT TTL memiliki mekanisme untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan melalui kegiatan audit internal sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Produksi PBPH PT TTL (Vineba Chandra) No. SK.02/TTL/ASK/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Struktur Organisasi.

No	Klausul	Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kegiatan Internal Audit dilakukan setiap triwulan setiap tahun terkait kegiatan pengelolaan hutan produksi lestari yang meliputi aspek prasyarat, ekologi, produksi, sosial, dan Legalitas Kayu. PT TTL telah menerapkan standar IFCC ST 1001:2021 - Issue 2 tanggal terbit 11 Oktober 2021 tentang Pengelolaan Hutan Lestari. • Dalam upaya untuk memantau kesehatan dan vitalitas hutan, PT TTL telah memiliki mekanisme atau prosedur yang diterapkan untuk melindungi hutan dari kebakaran hutan, penebangan ilegal, perambahan, perburuan ilegal, dan kerusakan yang disebabkan oleh faktor iklim, polusi udara atau kegiatan operasional pengelolaan hutan. • PT Tunas Timber Lestari telah memiliki mekanisme atau prosedur yang diterapkan untuk melindungi hutan dari penebangan ilegal; pemukiman ilegal; perburuan ilegal; perambahan yang tercantum dalam Prosedur Pengamanan dan Perlindungan Hutan, SOP Nomor: 18/SOP-TTL/2011 Revisi 3 tanggal 14 Juli 2023. SOP tersebut sebagai pedoman tata cara pelaksanaan pengamanan dan perlindungan hutan dari kegiatan perambahan, illegal logging (pencurian/penebangan liar) dan perburuan satwa • Untuk impelementasinya, PT TTL telah melaksanakan beberapa kegiatan pemantauan lingkungan yang dibuktikan dengan tersedianya data hasil pengukuran, yaitu Pengukuran curah hujan, suhu dan kelembaban sebagai dasar perhitungan indeks bahaya kebakaran, pengukuran erosi, pengujian kualitas air, pengelolaan dan pemantauan NKT dan kebakaran hutan. • PT Tunas Timber Lestari juga telah melakukan identifikasi terhadap HHBK yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen Laporan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu oleh Masyarakat Adat Kampung Binaan di Areal IUPHHK-HA PT Tunas Timber Lestari tahun 2021. • Berdasarkan dokumen tersebut di areal PT Tunas Timber Lestari terdapat beberapa HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat berupa: Nibung, Rotan, Pinang Hutan, Pakis, dll. Hasil wawancara dengan masyarakat yaitu dengan pemilik ulayat, Perusahaan memberikan akses dan tidak melakukan pelarangan terhadap setiap orang yang akan memanfaatkan HHBK. • PT TTL telah melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap kondisi kerja, penyesuaian juga telah dilakukan mengacu pada hasil pemantauan. Contoh untuk hasil pemeriksaan Kesehatan karyawan, pemeriksaan aspek K3 dan aspek ketenagakerjaan. • PT TTL telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan keefektifan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan keefektifan SMK3 di PT TTL dilakukan secara berkala, setiap bulan, triwulan dan setiap tahun. • Dalam struktur organisasi PT TTL posisi tugas Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah bertanggung-jawab langsung kepada Direktur Utama PT TTL. Pelaksanaan kegiatan Internal Audit dilakukan setiap triwulan setiap tahun terkait kegiatan pengelolaan hutan lestari. Hasil dari audit internal yang telah dilakukan oleh tim SPI, disusun Laporan Internal Audit setiap triwulan yang dilaporkan oleh SPI kepada Direktur Utama PT TTL. <p>• <i>PT TTL has a mechanism to monitor and evaluate the implementation of forest management activities through internal audit activities as stated in PT TTL PBPH Production Director Decree (Vineba Chandra) No. SK.02/TTL/ASK/I/2022 dated January 10 2022 concerning Organizational Structure.</i></p> <p>• <i>Implementation of Internal Audit activities is carried out every quarter of every year regarding sustainable production forest management activities which include aspects of prerequisites, ecology, production, social and wood legality. PT TTL has implemented the IFCC ST 1001:2021 - Issue 2 standard published 11 October 2021 concerning Sustainable Forest Management.</i></p> <p>• <i>In an effort to monitor the health and vitality of forests, PT TTL has implemented mechanisms or procedures to protect forests from forest fires, illegal logging, encroachment, illegal hunting, and damage caused by climate factors, air pollution or forest management operational activities.</i></p> <p>• <i>PT Tunas Timber Lestari has mechanisms or procedures implemented to protect forests from illegal logging; illegal settlements; illegal hunting; encroachment as stated in the Forest Security and Protection Procedure, SOP Number: 18/SOP-TTL/2011 Revision 3 dated 14 July 2023. This SOP is a guideline for procedures for implementing forest security and protection from encroachment activities, illegal logging (theft/illegal logging) and animal hunting</i></p> <p>• <i>For its implementation, PT TTL has carried out several environmental monitoring activities as evidenced by the availability of measurement data, namely measuring rainfall, temperature and humidity as a basis for calculating the fire danger index, measuring erosion, testing water quality, managing and monitoring HCV and forest fires.</i></p>

No	Klausul	Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> • PT Tunas Timber Lestari has also identified NTFPs as evidenced by the availability of the 2021 Report on the Utilization of Non-Timber Forest Products by the Indigenous Community of the Fostered Village in the IUPHHK-HA Area of PT Tunas Timber Lestari. • Based on the document, in the PT Tunas Timber Lestari area there are several NTFPs utilized by the community, namely: Nibung, Rattan, Areca Nut Forest, Ferns, etc. The results of interviews with the community, namely with customary owners, the Company provides access and does not prohibit anyone who will utilize NTFPs. • PT TTL has carried out monitoring activities on working conditions, adjustments have also been made referring to the monitoring results. Examples of employee health examination results, examination of K3 aspects and employment aspects. • PT TTL has monitored and evaluated the implementation and effectiveness of the health and safety management system. The implementation of monitoring and evaluation of the implementation and effectiveness of SMK3 at PT TTL is carried out periodically, every month, quarterly and every year. • In the organizational structure of PT TTL, the position of the Internal Audit Unit (SPI) is directly responsible to the President Director of PT TTL. The implementation of Internal Audit activities is carried out every quarter every year related to sustainable forest management activities. The results of the internal audits conducted by the SPI team are compiled into a quarterly Internal Audit Report which is reported by SPI to the President Director of PT TTL.
6	9. Perbaikan 9. Improvement	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan internal audit yang telah dilakukan oleh tim SPI dalam Laporan Internal Audit Triwulan II, Triwulan III, Triwulan IV tahun 2023 dan Triwulan I 2024, PT TTL telah melakukan tindakan perbaikan untuk seluruh temuan yang teridentifikasi. • PT TTL telah berupaya secara terus menerus memperbaiki kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem pengelolaan hutan lestari beserta implementasinya. Informasi bukti terkait esensi dari ketidaksesuaian yang terjadi dan tindak lanjut yang dilakukan serta hasil dari setiap tindakan perbaikan, telah didokumentasikan oleh tim SPI dalam Laporan Internal Audit setiap triwulan yang dilaporkan oleh SPI kepada Direktur Utama PT TTL. <p>- Based on the internal audit conducted by the SPI team in the Internal Audit Report for Quarter II, Quarter III, Quarter IV of 2023 and Quarter I of 2024, PT TTL has taken corrective actions for all identified findings.</p> <p>- PT TTL has made continuous efforts to improve the suitability, adequacy and effectiveness of the sustainable forest management system and its implementation. Evidential information related to the essence of the nonconformities that occurred and the follow-up actions taken as well as the results of each corrective action, have been documented by the SPI team in the quarterly Internal Audit Report reported by SPI to the President Director of PT TTL.</p>

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan Penilaian I di PT Tunas Timber Lestari memperlihatkan bahwa dari persyaratan standar PHL IFCC yakni IFCC ST 1001:2021 untuk pengelolaan Hutan Alam adalah berstatus sertifikasi memenuhi dengan catatan perbaikan atas ketidaksesuaian sesuai tata waktu yang teridentifikasi:

1. Berkategori Major: - (nihil)
2. Berkategori Minor: 1 Minor.
3. Observasi: 13 Observasi.

The results of the Surveillance 1 at PT Tunas Timber Lestari show that the company has complied with the requirements of the SFM IFCC ST 1001:2021 standard for Natural Forest management with notes on the identified non-compliances according to the timetable:

1. Major category: - (none)
2. Minor category: 1 Minor.
3. Observation: 13 Observations.

Records of non-conformities are controlled in the document MUTU-4116N.FM.

Catatan ketidaksesuaian dikendalikan dalam dokumen MUTU-4116N.FM.

Depok, 03 Juli 2024

No. : 353.3/SKEP-MUTU/VII/2024
Lamp. : 1 Lampiran
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan ke-1 Sertifikasi SFM IFCC PT Tunas Timber Lestari

Kepada Yth.
PT TUNAS TIMBER LESTARI
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan ke-1 sertifikasi SFM IFCC pada PT Tunas Timber Lestari sebagai berikut :

No. Sertifikat	:	LSSFM-001/MUTU/IFCC-002
Masa Berlaku Sertifikat	:	06 September 2023 s/d 05 September 2026
Ruang Lingkup	:	Hutan Alam / Natural Forest
Luas	:	± 214.935 Ha
Lokasi	:	Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan
Tanggal Penilikan	:	29 Mei - 06 Juni 2024
Tim Audit	:	<ul style="list-style-type: none">• Amin Kadeni, S. Hut (Lead Auditor, Bidang Produksi)• Miftah Farid, S. Hut (Magang Lead Auditor, Bidang Sosial)• Aep Sukendar, S. Hut (Auditor, Bidang Ekologi)
Standar	:	IFCC ST 1001:2021 Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari
Hasil Penilikan	:	
a. Pemenuhan Standar	:	Memenuhi
b. NC Major	:	-
c. NC Minor	:	1 Minor
d. Observasi	:	13 Pbservasi
Status Sertifikat	:	Sertifikat Yang ada Terpelihara
Audit Selanjutnya	:	Penilikan Ke-2 , selambat-lambatnya dilaksanakan pada Mei 2025

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur Operasional

Irham Budiman
Direktur Operasional

MUTU-4140N.FM/1.0/04082023